



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)  
Dengan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;  
2. Eselon I Kementerian Pertanian RI.  
Hari, Tanggal : Senin, 9 November 2021  
Waktu : Pukul 10.20 s.d 15.40 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara  
(KK-IV) Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta  
Ketua Rapat : SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Acara : 1. Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022;  
dan  
2. Isu-isu Aktual.  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy  
Hadir : A. Anggota DPR RI:  
44 dari 52 orang Anggota dengan rincian:  
PIMPINAN KOMISI IV DPR RI:  
4 dari 5 orang Pimpinan.  
1. SUDIN, S.E.  
2. H. DEDI MULYADI, S.H.  
3. RUSDI MASSE MAPPASESSU  
4. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.  
ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:  
1. Fraksi PDI Perjuangan  
9 dari 9 orang Anggota.  
1. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.  
2. H. SUNARNA, S.E., M.Hum.  
3. Ir. MINDO SIANIPAR  
4. ONO SURONO, S.T.  
5. YOHANES FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.

6. VITA ERVINA, S.E., M.B.A.
  7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
  8. Dr. H. SUTRISNO, S.E. M.Si.
  9. MARIA LESTARI, S.Pd.
2. Fraksi Partai Golongan Karya  
7 dari 7 orang Anggota.
    1. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
    2. BUDHY SETIAWAN
    3. FIRMAN SUBAGYO, S.E., M.H.
    4. Ir. ICHSAN FIRDAUS
    5. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
    6. ALIEN MUS, S.H.
    7. Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.Si.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
5 dari 6 orang Anggota.
    1. Ir. K.R.T. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
    2. RENNY ASTUTI, S.H., S.PN.
    3. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.
    4. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.
    5. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat  
4 dari 5 orang Anggota.
    1. YESSY MELANIA, S.E.
    2. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
    3. H. SULAEMAN L. HAMZAH
    4. JULIE SUTRISNO
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
4 dari 5 orang Anggota.
    1. H. MUNTAROM, S.Sos.
    2. DANIEL JOHAN, S.E.
    3. Drs. H. IBNU MULTAZAM
    4. EDWARD TANNUR, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat  
3 dari 5 orang Anggota.
    1. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.
    2. MUSLIM, S.HI., M.M.
    3. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
5 dari 5 orang Anggota.
    1. drh. H. SLAMET

2. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
3. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
4. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
5. SAADIAH ULUPUTTY, S.T.
  
8. Fraksi Partai Amanat Nasional  
2 dari 3 orang Anggota.
  1. HAERUDDIN, S.Ag., M.H.
  2. FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.
  
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
1 dari 2 orang Anggota.
  1. EMA UMIYYATUL CHUSNAH

#### B. Undangan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI/  
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.;
2. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian  
RI/Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.;
3. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian  
Pertanian RI/Dr. Ir. Suwandi, M.Si.;
4. Dirjen Prasarana Dan Sarana Pertanian  
Sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian RI/Ir. Ali Jamil, M.P.,  
Ph.D.;
5. Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian RI/Dr. Ir. Nasrullah,  
M.Sc.;
6. Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian  
RI/Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.;
7. Kepala BPSDMP Kementerian Pertanian  
RI/Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.;
8. Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan  
Kementerian Pertanian RI/Dr. Sarwo Edhy,  
S.P., M.M.; serta
9. Kepala Barantan Kementerian Pertanian RI/Ir.  
BAMBANG, M.M.

Jalannya Rapat:

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Tang terhormat Sekretaris Jenderal serta para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian,  
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, pada tanggal 30 September 2021 keputusan Rapat Internal tanggal 2 November. Pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian Pertanian dalam rangka membahas rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan isu-isu aktual lainnya.

Saudara Sekjen dan seluruh Eselon I, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat hari ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Rapat Dengar Pendapat ini kita mulai pada pukul 10.20 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.20 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Tatib Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tatib atau atas kesepakatan bersama, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan para pejabat Eselon I;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban pejabat Eselon I;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Pada Rapat Kerja tanggal 20 September 2021 yang lalu, Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp14,451 triliun. Program itu, program dan anggaran sudah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya tetap akan dimonitor perkembangannya. Apabila ada perubahan harus mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR RI.

Komisi IV DPR RI selalu mengingatkan bahwa program dan anggaran yang telah disusun fokus pada pemulihan ekonomi nasional yang selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun jumlah anggaran Kementerian Pertanian terbatas, namun tetap harus digunakan untuk membangun pertanian yang berkesinambungan dan fokus pada peningkatan produksi.

Terkait dengan produksi beberapa bahan pokok, Komisi IV DPR RI meminta saudara Sekjen dan para Eselon I untuk memperhatikan capaian produksi, guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam menyikapi permintaan pangan atau bahan pokok pada hari-hari besar nasional yang akan datang Natal dan tahun baru. Tidak hanya capaian produksi, namun juga sistem distribusi harus tetap diperhatikan walaupun system distribusi kebutuhan bukan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Namun dari sisi *supply* merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Oleh sebab itu, pada saatnya nanti Komisi IV DPR RI akan melihat kinerja Sekjen dan jajarannya untuk memberikan penjelasan tentang strategi pemenuhan produksi di dalam negeri. Apalagi dengan adanya La Nina yang diperkirakan terjadi di Indonesia tahun 2021 dan 2022, di mana hal ini dapat menimbulkan potensi bencana dan dapat mengancam ketahanan pangan karena berpotensi merusak tanaman.

Masih terkait kebutuhan pangan dalam negeri khususnya terhadap komoditas pertanian yang harus dipenuhi dari impor. Komisi IV DPR RI ingin mendapat penjelasan bagaimana sikap dan tanggapan Kementerian Pertanian akan rencana penerapan impor produk pertanian melalui rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan penajaman-penajaman terhadap program tahun 2022. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dinilai mendapatkan lebih lanjut, diantaranya kegiatan Menteri Pertanian bersama dengan sebagian Eselon I, II yang beberapa waktu lalu melakukan perjalanan keluar negeri dengan delegasi yang cukup besar. Terkait hal tersebut, Komisi IV DPR RI ingin mendapat penjelasan dari saudara Sekjen, apa *output* yang dicapai. Saya tegaskan lagi apa *output* yang dicapai atas jalan-jalan tersebut.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan bagaimana dan mengapa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan pada saat pandemi covid-19. Karena pada beberapa Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, Komisi IV DPR RI meminta agar komponen biaya perjalanan dinas ditekan seminimal mungkin, terutama anggaran perjalanan keluar negeri. Masih dalam konteks yang sama, pada akhir November 2021 akan dilaksanakan kegiatan kunjungan keluar negeri ke sepuluh negara dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi delegasinya. Bagaimana Kementerian Pertanian melakukan kegiatan yang menelan biaya banyak.

Saya mendapatkan info akan ada delegasi 100 orang lebih. Apa sih yang mau dilakukan di sana, menjual kopi? coba pikirkan saat ini, saat ini yang

terjadi adalah ekspor apapun ke luar negeri sulit kontainer. Jadi kalau sudah jalan-jalan keluar negeri pulang terus kontainernya nggak ada mau bawa pakai apa. Saya sudah komunikasi sama Kementerian Perdagangan, hampir semua komoditi ekspor sulit kontainer. Karena apa? setiap negara yang masuk kontainer itu dikarantina dulu 4-5 hari, maka terjadilah hambatan kontainer. Jadi jangan hanya ekspor, ekspor kemana-kemana tapi realisasinya nggak ada, prasarannya nggak ada. Ini memang bukan Tupoksinya Pertanian, tetapi kalau yang mau dijual di sana nggak ada transportasinya bagaimana.

Terkait dengan rencana tersebut di atas, Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan perjalanan keluar negeri ditunda dulu. Lebih baik anggaran perjalanan dinas keluar negeri tersebut digunakan untuk membangun pertanian di dalam. Mengingat pandemi covid-19 yang cukup parah masih bagi perekonomian bangsa kita.

Beberapa saat yang lalu Komisi IV DPR RI telah melaksanakan beberapa Rapat Panja termasuk didalamnya Rapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani. Beberapa hal yang mengemuka dalam ketentuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh saudara Dirjen Prasarana dan Sarana, antara lain dta yang digunakan untuk e-RDKK yang perlu diperbaharui secara cermat.

Beberapa kali kami FGD, saya selaku pimpinan mengusulkan e-RDKK itu berlaku 5 tahun, tapi setiap tahun dievaluasi. Jangan setiap tahun e-RDKK itu di-*collect* tapi kenyataannya yang bisa di distribusikan pupuk subsidi hanya 39. Sudahlah harusnya Kementerian Pertanian membuat suatu sistem *reward and punishment*, misalnya daerah Jawa Barat penghasil padi 5 juta ton, kalau anda mendapat bisa menghasilkan 6 juta ton diberikan pupuk tambahan, bagi wilayah yang turun jangan diberikan. Inikan nampaknya ada beberapa wilayah, “kami sudah berusaha Pak, semampu kami kerja keras”, tapi begitu berhasil nggak ada.

Saya masih ingat waktu itu saya duduk di pojok sana, saya juga mengatakan kepada Menteri yang lama, tidak perlu kasih piagam penghargaan kepada kepala daerah, bupati, gubernur, nggak perlu, ngga ada gunanya. Yang berguna adalah kalau Anda mencapai target nah saya kasih bantuan sekian miliar, 1% targetnya sekian persen, 5% sekian lagi. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki infrastruktur yang tidak didanai oleh APBN.

Pada pertemuan tersebut juga terlihat adanya komponen biaya untuk pupuk subsidi untuk beberapa sub sektor. Untuk itu pada hari ini kami sampaikan realisasi anggaran pupuk bersubsidi dimaksud untuk peternakan dan perikanan. Sekarang saya tanya nih Dirjen PSP, kalau perikanan yang *collect* data siapa? Inikan ada nih Rp415 miliar pupuk nih untuk perikanan ini. Ini yang *collect* siapa, yang tanggung jawab siapa? Jawab.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.SC.):**

Masuknya di Sekretariat Jenderal Pak, di Biro Perencanaan, kemudian di Direktorat Jenderal Budidaya apa ini seperti tambak itu Pak, masuk di Direktorat Jenderal itu.

**KETUA RAPAT:**

Yang *collect* data siapa? Kan data ini kan Rp415 miliar ini data ini, data tambak udang dan perikanan judulnya ini, iya kan termasuk air tawar ini. Yang *collect* data siapa?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Direktorat Jenderal Pak, Direktorat Jenderal yang mengelola penggunaan pupuk itu. Diantaranya adalah Direktorat Jenderal Budidaya.

**KETUA RAPAT:**

Itu Tupoksinya Kementerian Pertanian bukan?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Bukan, nah kami kordinasikan itu karena memang itulah yang menjadi pembicaraan kita di Panja. Itu bahwa data itu berasal dari Direktorat Jenderal terkait itu melalui Sekretariat Jenderal.

**KETUA RAPAT:**

Ditjen Budidaya?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Saya tanya Dirjen Budidaya dia tidak tahu menahu, kemarin kami RDP di sini. Dia tidak tahu menahu kalau ada pupuk subsidi senilai kurang lebih Rp415 miliar. Begitu pula dengan peternakan, coba seberapa banyak sih jadi rumput ilalang itu dikasih pupuk nanti rumputnya dibabat dikasih makan ternak, inikan nggak logika. Kenapa tidak dialihkan untuk yang paling utama, misalnya Pajale (Padi, Jagung, Kedelai) yang itu biarkan saja, misalnya perikanan keluarkan kembalikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena apa? memang dulu satu badan, tapi setelah pisah kok ini nggak dialihkan. Jangan sampai ini temuan, kan selama ini tidak pernah di Komisi dibahas masalah ini. Maka saya juga maunya *clear and clean*, Bapak-bapak disini jangan dituduh ada bermain lebih baik keluarkan, kembalikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saya minta tolong ditampilkan yang saya minta tadi. Yang kebutuhan itu loh, nah ini volume kebutuhan pupuk data e-RDCK, iya kan. 2020 20 juta ton ya? Iyakan. 2021 33 juta, betul nggak Pak Dirjen? Coba dilihat dulu. Nah, ini volume kebutuhan, realisasinya berapa? Saya minta nanti pada *break* atau pada jam 12.30 WIB, saya minta bukan volume kebutuhan tapi volume realisasinya. Maka sengaja saya tampilkan di awal untuk nanti disiapkan.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Sekjen dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal di atas.

Silakan.

Pak Dedi mau ngomong? Ya silakan.

**F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya nyambung saja biar nanti nggak bertele-tela, apa yang disampaikan Pak Ketua Pak. Berdasarkan hasil pertemuan saya di beberapa tempat, saya sih di Jawa Barat terutama para petani ikan air tawar secara umum mereka tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, karena rata-rata pupuk bersubsidi itu kan kelompoknya ke Gapoktan, kelompok tani. Nah, kelompok tani ikan ini sampai hari ini hampir di semua tempat yang saya kunjungi mereka mengeluhkan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Barangkali ada pembicaraan yang tadi disampaikan Pak Ketua, segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan pada Kementerian Kelautan Dirjen Perikanan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dedi.

Selanjutnya Pak Sekjen dipersilahkan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ketua, kami interupsi tentang.

**KETUA RAPAT:**

Apa lagi Pak Doktor?

Masalah ikan? Iya 1 menit.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Nggak sampai 1 menit kok.

Terima kasih Pak Ketua.

Ini saya memperkuat Pak Sekjen apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Pimpinan tadi Pak Dedi. Bahwa juga di Sumatera Barat itu faktanya juga menunjukkan demikian. Jadi namanya kelompok Pokdakan atau Pokdasar, apa segala macamnya, kelompok ikan itu semuanya maupun



termasuk juga bioflok itu juga nggak mendapatkan pupuk bersubsidi itu seperti apa, gitu. Termasuk juga Mina Padi, Mina Padi itu di Sumatera Barat ada tapi dia nggak mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi saya minta supaya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, ya sebanyak saya kunjungi ini sudah 2 tahun ini nggak dapat.

Demikian Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Pimpinan, Ketua, sebentar 1 menit saja, masalah yang sama.

**KETUA RAPAT:**

Ya 10 menit saja kalau provokator.  
Silakan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Itukan tahun lalu Ketua, kebijakan alokasi yang masih terjadi masalah bagi para petambak. Nah, itu waktu jaman Pak Dirjennya Pak Sarwo Edi, dari situ mungkin ada terjadi miscommunication antara kelembagaan ini, baik dari Kementan sama yang KKP. Karena dari tahun lalu pas 2019 ada kebijakan perubahan alokasi pupuk jaman Pak Jenderal Sarwo Edi Pak Dirjen. Ini untuk mengingatkan saja.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum Pak Sekjen, saya memperkenalkan Anggota baru karena masih Anggota, mungkin nanti setelah makan siang baru jadi Pimpinan, Pak Rusdi Masse Mappasessu. Silakan dari Fraksi Nasdem, silakan perkenalkan diri Pak. Sekarang masih Anggota tapi beberapa jam lagi jadi Pimpinan.

**F-NASDEM (RUSDI MASSE MAPPASESSU/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Terima kasih Ketua.

Saya perkenalkan diri nama saya Rusdi Masse dari Dapil Sulawesi Selatan III, Fraksi Nasdem. Mungkin itu Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Rusdi.  
Silakan Pak Sekjen lanjutkan.

## **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih Pak Ketua.

Yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua,  
Bapak-Ibu para Anggota yang kami muliakan,  
Para pejabat Eselon I dan II Kementerian Pertanian yang berkesempatan hadir.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-Ibu sekalian ijinakan para Pimpinan dan Anggota kami menyampaikan me-*refresh* kembali berkait dengan program kita di 2022 sebagai berikut.

Lanjut tayangan, kami laporkan bahwa tema RKP yang harus kami acu di dalam menetapkan program dan kegiatan, serta prioritas-prioritas nasional, dan program prioritas yang sudah menjadi garis yang harus kami ikuti untuk program di Kementerian Pertanian, sebagai berikut.

Tema RKP kita adalah pemulihan ekonomi dan reformasi structural, yang tentu ini fokus kepada prioritas nasional nomor satu itu berkait dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Lanjut saja, nah dalam prioritas nasional nomor satu itu ada dua program prioritas yang harus kami acu untuk nanti dijabarkan kepada program Kementerian Pertanian serta kegiatannya, yaitu program prioritas nomor tiga terkait dengan peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan. Yang kedua adalah program prioritas nomor enam, itu berkait dengan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Berdasarkan kedua hal tersebut, program prioritas nomor satu dan program prioritas nomor tiga dan enam, kami jabarkan menjadi lima program di Kementerian Pertanian. Program nomor pertama adalah terkait dengan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Program kedua adalah program nilai tambah dan daya saing industry. Kemudian yang ketiga adalah program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat ada program pendidikan dan pelatihan. Dan kelima adalah program dukungan manajemen.

Ijinkan kami menyampaikan rancangan program utama kita di 2022, sebagai berikut. Lanjut, terkait dengan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan ini adalah alokasi terbesar dari kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian yang tentu diampu oleh Dirjen teknis dan komoditas serta badan-badan terkait yang menyangkut masalah dukungan terhadap ketersediaan akses dan konsumsi pangan kita.

Yang pertama adalah kita fokus kepada pengembangan padi, jagung, kedelai, dan beberapa pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan

kita. Kemudian kita fokus seperti halnya kesimpulan rapat kita beberapa rapat di yang terdahulu arahan Komisi IV DPR RI kita fokus juga kepada *strengthening* atau penguatan perbenihan dan pembibitan, baik itu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Kemudian juga yang berkaitan dengan hortikultura perkebunan, berkaitan juga dengan peternakan, prinsipnya adalah bahwa peningkatan produktivitas dan produksi menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketersediaan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa fokus dari pada program ini menjadi yang utama. Oleh karena itu, nanti akan kami sampaikan bahwa pada program inilah alokasi anggaran terbesar kita alokasikan.

Yang kedua berkaitan dengan program nilai tambah dan daya saing industry, itu diampu oleh Dirjen Komoditas karena kita memiliki Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil di masing-masing ini yang akan mengampu hilirisasi dari pada produk-produk pertanian hulu yang sudah kita produksi. Kegiatannya menyangkut masalah dukungan Alsintan pasca panen dan pengolahan, kemudian pengolahan dan pemasaran hasil itu sendiri, kemudian pengembangan juga benih perkebunan. Karena ini untuk perkebunan masuk di dalam konteks peningkatan nilai tambah dan daya saing berkaitan dengan utamanya untuk perkebunan rakyat kita. Pengembangan kawasan perkebunan dan penyediaan sarana prasarana pendukung program korporasi pertanian kita.

Yang ketiga berkaitan dengan riset dan inovasi ilmu pengetahuan, kami fokuskan kepada perakitan varietas baru unggul untuk tanaman pangan hortikultura, kebun, dan peternakan. Di samping juga mendesiminasikan atau menyuluhkan hasil-hasil terdahulu berkaitan dengan varietas-varietas unggul untuk diperbanyak menjadi benih-benih yang punya potensi besar sebagaimana juga arahan Komisi IV DPR RI untuk di setiap provinsi kita mengadakan balai-balai benih untuk memperkuat dari pada perbenihan kita, didukung dengan varietas unggul yang dihasilkan Badan Litbang. Yang kedua adalah perakitan teknologi budidaya, perbanyak benih sumber, dan hilirisasi inovasi teknologi pertanian.

Yang keempat program pendidikan dan pelatihan. Kami laporkan Pak Ketua, para Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan, kami fokus pada bimbingan teknis yang bersifat vokasional di dalam mendukung semua Ditjen teknis seperti halnya juga direkomendasikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk meningkatkan ini dan memerankan Pimpinan dan Anggota di dalamnya di dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui bimbingan teknis. Kemudian juga di situ ada kegiatan yang bersifat penyuluhan, pelatihan, dan juga operasional dari pada penyuluh kita di dalam kerangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyuluhan, di samping juga pendidikan utamanya dan pelatihan vokasi yang sudah kami sampaikan tadi.

Yang berikutnya adalah dukungan manajemen yang berkaitan dengan upaya-upaya kita untuk mendukung semua kegiatan teknis yang ada di setiap Ditjen teknis dan badan di dalam kerangka untuk koordinasi fasilitasi, kemudian juga legislasi, yang tentu sangat penting di dalam kerangka kita memperbaiki

berbagai hal yang terkait dengan peraturan-peraturan yang ada didalamnya. Ini yang berkaitan dengan rancangan program kami kita semua.

Dan ijin berikutnya adalah menyampaikan target produksi komoditas utama tahun 2022, sebagai berikut. Untuk tanaman pangan padi kita menargetkan 55,2 juta ton, jagung 20,1 juta ton, kedelai 0,2 juta ton. Untuk hortikultura, bawang merah kita targetkan 1,64 juta ton, cabe 2,87 juta ton, bawang putih 91 ribu ton, kakao 780,9 ribu ton. Kemudian tanaman perkebunan yang lain kopi kita targetkan 795,45 ribu ton, kelapa 2,86 juta ton, gula tebu 2,3 juta ton, dan daging sapi kerbau 0,44 juta ton atau 444,55 ribu ton. Dari target itu kami mengalokasikan berbagai anggaran kita di masing-masing program sebagai berikut.

Yang pertama berkaitan dengan program ketersediaan dan akses dan konsumsi pangan berkualitas kami alokasikan Rp6,8 triliun. Untuk nilai tambah dan daya saing industri kami alokasikan Rp1,65 triliun. Program riset dan inovasi Rp315 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp754 miliar, dan dukungan manajemen Rp4,9 triliun, dan total pagu anggaran kita di 2022 adalah Rp14,45 triliun.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan.

Berdasarkan sumber dana per fungsi per unit Eselon 1 kami sampaikan laporannya sebagai berikut. Masing-masing Eselon 1 dari Rp14,451 triliun Sekretariat Jenderal dialokasikan Rp1,598 triliun, Inspektorat Jenderal Rp97,7 miliar, Dirjen Tanaman Pangan Rp2,19 triliun, hortikultura Rp985 miliar, Dirjen Perkebunan Rp1,18 triliun, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,61 triliun, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp3,01 triliun, Badan Litbang Pertanian Rp1,29 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp1,05 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp445,9 miliar, dan Badan Karantina Pertanian Rp1,01 triliun.

Demikian hal-hal yang berkaitan dengan program serta penganggarnya. Mohon kami diijinkan untuk slide nomor berkaitan dengan isu actual, ijin kami melaporkan yang berkaitan dengan iklim yang harus kita antisipasi berkaitan utamanya dengan iklim basah yang menghadang kita di 2021 ini.

Bapak dan Ibu para Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan.

ini adalah prediksi iklim global kita terkini *update* 1 November 2020 yang kami ambil dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) sebenarnya ini juga *me-river* dari *International Research Institute* di Colombia yang selalu di *river* oleh berbagai institusi terkait dengan prediksi global. Kalau lihat grafiknya ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon ijin Pak Ketua, Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota, ini adalah semua model prediksi yang disampaikan oleh IRI (*International Research Institute*) yang berkaitan dengan *climate*. Semuanya berada pada posisi di bawah titik nol, itu artinya bawah ini adalah tahun basah saat ini. Nah, lebih jelas lagi di sebelah kanan ini grafiknya dari saat ini sampai nanti Maret itu masih ada sampai April mohon maaf, sampai April ini garis 50 ini adalah garis normal iklim normal, kemudian yang biru ini

adalah berkaitan dengan La Nina, sehingga La Nina ini akan kita hadapi diprediksi sampai dengan April tahun depan. Kemudian setelah itu akan muncul lagi tahun normal, bulan-bulan normal setelah itu. Itu yang menjadi dasar iklim global kita.

Lanjut, kemudian prediksi ini kemudian digunakan oleh BMKG untuk memprediksi iklim di Indonesia sebagai berikut, utamanya di bulan November dan Desember 2021. Ini sudah diplot oleh BMKG di mana wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi 150 sampai 300 mm per 10 harian ini berbagai provinsi sudah diidentifikasi. Kemudian wilayah dengan peluang curah hujan lebih dari 70% itu juga sudah dipetakan oleh BMKG. Kemudian wilayah yang perlu diwaspadai untuk berpotensi banjir pun sudah ada prediksinya. Nah, berdasarkan inilah nanti kita akan menggunakan data ini sebagai bagian kita untuk melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi dari pada La Nina yang kita hadapi saat ini.

Lanjut, upaya-upaya adaptasinya Bapak-Ibu sekalian, ini kami presentasikan untuk kedua hal, tidak saja untuk basah tetapi juga untuk kering, karena ke depan kita harus punya standar untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah kita harus mempersiapkan secara konkrit kantong-kantong air dalam bentuk embung maupun dam parit atau seterusnya untuk menampung air. Tadi Pak Ketua, juga menyinggung beberapa pembicaraan yang berkaitan dengan irigasi pun kita harus hemat air. Setelah kita tampung pada saat musim hujan kita gunakan di musim kemarau, itu pun juga pemanfaatannya harus secara hemat. Salah satu aplikasinya adalah irigasi tetes, irigasi perpipaan, itu kita catat sebagai upaya-upaya untuk efisiensi irigasi.

Kemudian penggunaan benih disesuaikan dengan kondisi iklimnya, kondisi cuacanya, kalau itu basah berarti dominan varietas yang tahan terhadap kondisi genangan. Kalau berkaitan dengan kering El Nino pada saatnya nanti biasanya Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah La Nina akan muncul El Nino, itu juga harus kita siapkan untuk varietas-varietas yang tahan kering. Kemudian juga kita mengangkat diversifikasi pangan lokal dengan maksud bahwa kita tidak juga hanya energi kita pada padi, jagung, kedelai, tapi juga pakan pangan lokal ini akan menjadi upaya kita untuk karena ini pemanfaatan dari segi air cukup lebih rendah dibanding kalau kita upaya melalui padi sawah.

Ini mitigasi-mitigasinya juga sudah kami siapkan, intinya adalah bagaimana mengurangi pemanasan global di sektor pertanian. Seperti misalnya secara konkrit di peternakan kotoran hewannya kita proses menjadi pupuk kandang maupun bio gas itu bagian penting untuk mengurangi *global warming*.

Lanjut, langkah operasional yang lain berkaitan dengan La Nina secara khusus kami sudah klasifikasikan ini Bapak-Ibu sekalian. Kita perlu memetakan wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir, itu yang utama. Kemudian kita gunakan *early warning system* yang secara rutin dipantau oleh dari informasi BMKG, kita gunakan prediksinya BMKG. Kemudian juga kita menerapkan gerakan La Nina, ini berkaitan dengan upaya-upaya mencegah atau

menanggulangi dari pada banjir. Menggunakan benih yang tahan genangan diantaranya ada Impari 1-10, Impari 29 dan seterusnya.

Optimalisasi pasca panen karena biasanya untuk mengeringkan para petani kesulitan ini maka tentu *dryer* dan pengering lainnya sangat diperlukan oleh mereka. Kemudian rehabilitasi yang berkait dengan irigasi maupun *drynase* ini penting untuk bisa menanggulangi daripada banjir kita. Itu upaya-upaya Bapak dan Ibu sekalian, yang berkait dengan menghadapi La Nina yang saat ini sedang kita hadapi.

Demikian Pak Ketua, jadi kami ijin untuk menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ketua nanti para Eselon I yang terkait mohon juga disampaikan. Yang pertama tentu berkait dengan upaya kami untuk menghilirisasi sampai kepada *market* ekspor, tadi Pak Ketua menelisik berkait dengan upaya-upaya kita keluar negeri. Kami akan perhatian itu Pak Ketua, prinsipnya adalah bahwa kami pada yang sudah kami lakukan kemarin adalah tidak saja berjalan dalam konteks G20 tapi juga kami mengadakan upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk pertanian kita di luar negeri yang kemarin kita fokus di Italia dan juga di Belgia, di Brussel di dua tempat itu.

Kemudian yang akan datang *One Day with Indonesian Coffe, Fruits and Flowers*, atau hortikultura di 10 negara. Kami laporkan Pak Ketua, bahwa kita juga perlu menindaklanjuti dari dua case yang kemarin sudah kami lakukan dengan maksud sekali lagi untuk tidak saja fokus Pak Ketua, di dalam ekspor tapi juga upaya-upaya kami mempromosikan supaya juga ada investor masuk ke Indonesia dengan tentu penjelasan-penjelasan kita di event itu di dalam kerangka potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Jadi menanamkan investasi di Indonesia dari negara-negara yang kita lakukan promosinya itu.

Kemudian yang terkait dengan pupuk bersubsidi kami mohonkan agar Pak Dirjen PSP lebih detail lagi. Kami sedang dalam proses untuk mengkoordinasikan untuk memisahkan pupuk subsidi di perikanan dengan di kita.

Saya kira itu dari kami, kami mohonkan singkat-singkat di mulai dari Dirjen Tanaman Pangan, kemudian Hortikultura, dan seterusnya. Mohon ijin ini Pak Pimpinan, boleh kami lanjutkan.

Silakan Pak Dirjen.

**DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):**

Terima kasih Pak Sekjen.

Ijin Bapak-Ibu Ketua, dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Dirjen Tanaman Pangan mendapat alokasi 2020 sebesar Rp2,1 triliun, ijin menurun dibanding 2021 sebesar Rp3,6 triliun. Nah, kegiatannya terutama untuk pengembangan padi, peningkatan produksi, produktifitas seluas 1,06 juta

hektar. Diharapkan akan melibatkan sekitar 3 juta tenaga kerja, karena 1 hektar sekitar 3 orang dan berdampak kepada produksi.

Selanjutnya kegiatan peningkatan produksi benih dengan sasaran 392 ribu hektar dengan perkiraan menyerap tenaga kerja sekitar 1,1 juta orang. Peningkatan produksi kedelai 52 ribu hektar, kemudian ada beberapa komoditas pangan lokal, kayu ubi, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, jumlahnya kecil 25 ribu hektar. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pasca panen pengolahan hasil dalam rangka program peningkatan nilai tambah dan daya saing ada 4.179 unit dengan pagu Rp541 miliar. Selain itu ada kegiatan hubungan manajemen di bawah 10% Rp217 miliar.

Target produksi sesuai yang disampaikan Pak Sekjen tadi halaman 6, 55,2 juta ton tahun 2022, kemudian jagung 20,1 juta ton kadar air 15% dan kedelai 0,2 juta ton.

Demikian Pak Sekjen yang bisa kami sampaikan.  
Bapak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Pak Dirjen Horti.

**DIRJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati,  
Pak Sekjen, Bapak dan Ibu semuanya.

Langsung saja pada kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura. Jadi tahun 2022 Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan alokasi Rp985.515.000.000,00 dengan alokasi untuk kegiatan peningkatan sayuran dan tanaman obat senilai Rp184 miliar, dengan rincian didalamnya ada kegiatan pengembangan bawang merah, kampung bawang merah seluas 4.495 hektar dengan anggaran Rp32,3 miliar. Kampung cabai ada 5.500 hektar dengan pagu anggaran Rp66 miliar, jahe, dan tanaman obat, dan lain sebagainya, termasuk juga di dalamnya ada bawang putih seluas 1.700 hektar dengan nilai Rp20,5 miliar. Ada juga kegiatan-kegiatan untuk kampung sayuran dan tanaman obat dalam rangka mendukung *food estate* ada 9 kegiatan, di sini ada Rp12 miliar. Pertumbuhan korporasi juga ada 8 kegiatan dengan nilai Rp2 miliar dan lain sebagainya.

Semua kegiatan-kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung program-program Direktorat Jenderal Hortikultura terutama dalam hal penyediaan komoditas hortikultura. selain itu ada juga kegiatan lanjut di kegiatan di slide

nomor 11. Untuk peningkatan produksi buah dan hortikultura nanti juga ada persiapan kampung buah dan hortikultura untuk komoditas pisang, manggis, durian, mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk, buah lainnya, terus ada bunga krisan, anggrek, hortikultura, dan seterusnya kegiatan peningkatan produksi buah dan hortikultura ini, total dialokasikan Rp119,2 miliar

Terus untuk kegiatan perbenihan slide berikutnya, jadi banyak target-target benih yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, antara lain benih untuk bawang putih, bawang merah, terus benih ripang, benih kentang, benih pisang, benih manggis, jeruk, durian, mangga, kelengkeng dengan volume termasuk juga kegiatan benih pisang yang cukup banyak kami alokasikan ada kurang lebih ... benih pisang kami siapkan dan benih jeruk kurang lebih sekitar 1 juta benih yang akan disiapkan di tahun 2022. Total anggaran untuk kegiatan perbenihan hortikultura senilai Rp326 miliar.

Selanjutnya, untuk perlindungan hortikultura untuk kegiatan pengendalian hama terpadu untuk pengendalian organisme hortikultura dengan rincian kegiatan ada di sebelah kanannya. Nanti mengalokasikan pagu anggaran totalnya Rp75 miliar.

Dan untuk peningkatan program nilai tambah dan daya saing industry hortikultura dengan berbagai kegiatan di dalamnya termasuk penerapan *good agriculture practice*, *food healthy practice*, penumbuhan dan pengembangan pertanian organik, dan pasar tani, dan penumbuhan usaha micro kecil dan menengah hortikultura dalam bentuk paket bantuan sarana dan prasarana pasca panen pengolahan bawang, pengolahan cabai, pengolahan sayuran lainnya dan buah-buahan. Kami mengalokasikan total anggaran Rp164 miliar.

Dan yang terakhir adalah ada untuk dukungan manajemen, di mana dalam dukungan manajemen ini terdiri dari kegiatan gaji, untuk layanan perencanaan, layanan umum, layanan sarana dan prasarana internal, semuanya senilai Rp116,4 miliar.

Demikian kami sampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pimpinan kami lanjutkan Pak Plt. Ditjen BUN, kemudian sekaligus dilanjutkan PSP.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI(Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Sekjen.



Yang kami hormati Pimpinan,  
Dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan banggakan.

Ijin Pak Ketua, Bapak-Ibu semua, kami sampaikan pertama terkait dengan perkebunan. Anggaran kita di rencana kita 22 untuk perkebunan ini totalnya adalah 1,177 lebih kurang. Itu terdiri dari anggaran belanja pegawai dan belanja modal, serta belanja barang atau belanja bantuan Pemerintah. Belanja barang atau belanja bantuan Pemerintah ini sekitar 1,05 sekitar 64 itu belanja modal dan Rp9 miliar itu adalah untuk belanja pegawai.

Seterusnya, rincian anggaran per fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan 2022, kita rencanakan seperti tabel yang sudah Bapak-Ibu terima. kami pikir yang pertama itu adalah program nilai tambah dan daya saing industri itu sekitar Rp915 miliar, itu terdiri dari logistik benih, kemudian ada pengembangan kawasan perkebunan unggulan nasional berbasis korporasi petani dengan berbagai macam komoditas. Terus kemudian berikutnya adalah koordinasi dan evaluasi kegiatan. Slide berikutnya yaitu koordinasi dan evaluasi kegiatan Bimtek. Terus kemudian peningkatan penanganan OPT, Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis komoditas perkebunan dan pasca panen, pengolahan atau hilirisasi.

Dan berikutnya adalah program dukungan manajemen, Bapak dan Ibu semua itu adalah rincian daripada penggunaan anggaran kita 2022 untuk sektor perkebunan. Catatan di situ adalah nursery tahun 2022 sebanyak satu ini pembiayaan melalui SBSN, termasuk produksi benih di BPTP, Bimtek dialokasikan sebanyak 165 kali Bimtek, termasuk kemudian anggaran untuk nabati dan pompa kebakaran, termasuk asam formiat untuk meningkatkan kualitas daripada lateks karet masyarakat kita ada di sana, termasuk alat pengolah minyak atsiri 15 paket Bapak dan Ibu semua.

Dan berikutnya target produksi slide berikutnya, saya pikir ini sudah disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Kami teruskan ke slide mungkin terakhir Bapak-Ibu semua, di slide terakhir karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Slide terakhir ini adalah dukungan terhadap ekspor selain tadi budidaya di depan, itu juga slide terakhir yang untuk ekspor dukungan kita dari Dirjen Perkebunan ada di slide yang terakhir yang halaman 11. Itu komoditas-komoditas perkebunan kita yang sebagian di kegiatan yang sudah kami sampaikan dari nilai tambah terus kemudian penyediaan benih, logistik benih, pengembangan kawasan, dan lain sebagainya, seperti yang kami sampaikan di slide ini Bapak-Ibu semua. Mungkin itu yang kami sampaikan dari Perkebunan.

Ijin Pak Sekjen, kami teruskan yang PSP. PSP *Insyah Allah* 2022 kita alokasi anggaran sekitar total Rp3.005.669.852.000,00 ini terdiri dari belanja pegawainya 27,9. Slide empat, ini belanja pegawainya 27,9 sekitar begitu. Terus kemudian belanja operasional 14,3 dan belanja non operasional yang bantuan semuanya tadi itu bantuan Pemerintah itu ada sekitar Rp2,903 triliun.

Kalau kebijakan program strategis slide berikutnya, program strategis di Ditjen PSP kita punya lima Direktorat teknis itu ada di perluasan areal dan

perlindungan lahan. Kemudian slide berikutnya, kemudian Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pesticida, seterusnya Direktorat Alsintan dan termasuk Direktorat Pembiayaan dan Dukungan Manajemen. Jadi anggaran kita tadi kita sudah alokasikan terhadap 6 atau 5 Direktorat kita ditambah Sekretariat.

Slide berikutnya, rincian alokasi anggaran untuk 2022 kita rencanakan seperti ini Bapak-Ibu semua. Untuk yang program ketersediaan akses dan konsumsi pangan. Yang pertama adalah kegiatan pengolahan air irigasi untuk pertanian, ini totalnya sekitar Rp629 miliar, itu terdiri dari fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat, prasarana bidang pertanian kehutanan dan lingkungan hidup, khusus ini berkaitan dengan pertanian. Terus kemudian jaringan irigasi tersier itu tadi perpompaan, terus ada daerah irigasi tersier. Seterusnya ada perluasan slide berikutnya, perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

Slide berikutnya, perluasan dan perlindungan lahan pertanian ada di sana, rekomendasi perlindungan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, kemudian fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat, kemudian prasarana bidang pertanian. Khusus untuk pertanian ada jalan usaha tani tentunya ini. Jalan usaha tani kemudian prasarana pengembangan kawasan atau optimalisasi lahan, termasuk kegiatan yang *food estate*.

Yang ketiga pengolahan slide berikutnya, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian. Ini untuk Alsintan termasuk di sini ada sarana pupuk dan pestisida termasuk pembiayaan pertanian. Jadi ini ada untuk alat mesin pertanian ini ada di sektor tanaman pangan, ini roda dua traktor roda dua, ada roda empat, ada pompa air 6 inci dan 4 inci.

Terus kemudian yang untuk sub sektor hortikultura ada cultivator, ada juga perbengkelan Alsintan, dan termasuk prasarana pengembangan kawasan termasuk yang pertanian digital. Nah, untuk pupuk dan pestisida ini pelayanan publik kepada masyarakat melalui pupuk subsidi. Di sini kita lihat ada penyiapan anggaran untuk 10 juta orang yang pembayaran tentu ada anggaran di sana sekitar Rp74 miliar itu adalah untuk membiayai ATK dan kemudian honor-honor staf PPL atau petugas dinas yang mengentri data RDKK. Terus kemudian pelayanan publik lainnya, itu verifikasi dan validasi penerima pupuk subsidi. Itu kita anggarakan di PSP seperti biasanya.

Terus sarana yang lain adalah UPO ada di sana termasuk pupuk bio diversifikasi dan pupuk organik cair. Seterusnya untuk fasilitas pembiayaan ada untuk asuransi pertanian, AOTP, dan juga asuransi ternak sapi atau kerbau. Nah, untuk dukungan manajemen saya pikir kami tampilkan di slide berikutnya tadi itu ada layanan kehumasan organisasi dan lain sebagainya Bapak-Ibu semua.

Dan slide terakhir ini yang kami sampaikan saya pikir Pak Sekjen tadi sudah menyampaikan ini Bapak-Ibu semua yang ada di PSP untuk kegiatan kita yang nanti mendukung aspirasi daripada Bapak-Ibu semua kami di Komisi IV DPR RI dan itu sudah kami siapkan sepenuhnya sudah kitab hahas.

Saya pikir mungkin Pak Sekjen, ini yang kami sampaikan dari Perkebunan dan PSP. Pak Ketua, ijin terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, kami lanjutkan.  
Pak Dirjen PKH.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN  
PERTANIAN (Dr. Ir. NASRULLAH, M.Sc.):**

Terima kasih Pak Sekjen.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Tunggu Pak Haerudin, kenapa melamun Bapak ada masalah apa, Bapak masih punya harapan kan.

**DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN  
PERTANIAN RI:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Mohon ijin kami menyampaikan terkait dengan program kegiatan dan anggaran untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 *Insyah Allah* kami menargetkan untuk produksi daging 4,59 juta ton, kemudian produk ekspor 451 ribu ton. Dan ini akan menaungi atau membina kurang lebih 13,56 juta rumah tangga peternak. Dan kami harapkan bahwa targetnya adalah ketahanan pangan ternak dan sekaligus kesejahteraan peternak.

Slide berikut, alokasi anggaran kami untuk tahun 2022 sebesar Rp1,605 triliun, memang di bawah daripada awal tahun 2021 sebesar 2,13, walaupun dalam perjalanan juga sampai Rp1,6 triliun setelah adanya refocusing. Dalam anggaran Rp1,6 triliun ini yang terbesar adalah di program ketersediaan dan akses konsumsi pangan berkualitas sebesar 798, kemudian nilai tambah sebesar 1,7% dan program manajemen 18%.

Lanjut, secara rinci kami sampaikan bahwa untuk penyediaan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, didalamnya adalah pengembangan ternak dari semua ternak-ternak yang diharapkan

menghasilkan produksi daging untuk ketahanan pangan protein kita. Kemudian ada akselerasi kelahiran dari khususnya sapi dan kerbau dalam program optimalisasi reproduksi melalui dengan inseminasi buatan dan Kemudian untuk penguatan UPT pendidikan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul, di dalamnya juga ada kami mendapatkan SBSN untuk pengembangan kegiatan kerbau dan sapi perah nasional.

Kemudian juga untuk peningkatan produksi pakan ada Rp93 miliar, penanggulangan penyakit hewan 186, ini juga nanti kaitan dengan La Nina karena berdampak juga terhadap kesehatan hewan khususnya unggas, kaitan dengan influenza. Kemudian untuk kesehatan masyarakat Rp48 miliar, dan nilai tambah daya saing sebesar Rp27,4 miliar, serta dukungan manajemen 298.

Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan secara ringkas. Mohon arahan lebih lanjut.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih.

Ijin Pak Ketua, Pak Kepala Badan Litbang, singkat Pak.

**KEPALA BADAN LITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Ijin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan Balitbang ke depan.

Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota.

Kami perlu laporkan bahwa dari 537 tenaga Badan Litbang dari 1.600 peneliti, ada kurang lebih 1.100 yang akan berpindah ke Badan Riset Inovasi Nasional. Dan ini akan mengurangi beberapa tenaga peneliti kita yang ada di Badan Litbang.

Lanjut, Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan, lanjut.

Terkait dengan rencana transformasi Badan Litbang ke badan yang baru, kita sudah menyusun sebelumnya jadi namanya itu akan berubah menjadi Badan Pengolah Sistem Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan kordinasi, perekayasaan, pengelolaan, dan penyusunan rekomendasi dan kompetensi pertanian. Kenapa penting Badan Pengolah

Sistem Pertanian ini? Karena terkait dengan pertanian banyak yang sifatnya spesifik yang perlu penanganan khusus, karena satu provinsi dan kabupaten yang lain dan seperti terjadi penyakit ini perlu orang-orang yang khas yang ada di lapangan yang sifatnya mengantisipasi terkait dengan fenomena iklim dan sebagainya. Oleh karena itu, kita membutuhkan badan ini untuk sebagai *bridging* jembatan hasil-hasil riset, baik yang dari BRIN maupun perguruan tinggi, dan termasuk Balitbang untuk menyampaikan ke masyarakat petani dan kelompok tani kita.

Lanjut, ini kira-kira struktur anggarannya Pimpinan, dari Rp1,2 triliun anggaran jadi yang akan beralih ke BRIN itu, ini hasil pembicaraan DJA dengan BRIN itu ada 213 yang sementara di bintang. Ini termasuk kegiatan pendampingan Denfarm dan perbenihan yang untuk Dapil ini akan dibintang masuk di 213 ini. Ini akan dibintang Pak, yang akan dialihkan ke BRIN. Itu sesuai dengan, saya kebetulan nggak ikut Pak Pimpinan, jadi yang ini akan dialihkan ke BRIN termasuk yang pendampingan Denfarm kita dan perbenihan yang selama ini yang rencana kita alokasikan ke teman-teman Dapil. Ada kurang lebih Rp213 miliar.

Lanjut, ini kira-kira gambarannya Pak Pimpinan. Jadi itu termasuk penelitian pengkajian dan perbenihan Rp213 miliar yang selama ini yang kita untuk tahun kemarin untuk perbenihan, Bimtek, dan Dempan yang untuk teman-teman Dapil masuk Rp213 miliar yang dibintang yang akan diserahkan ke BRIN.

Lanjut, jadi ini kira-kira gambaran Badan Pengolah Sistem Pertanian yang akan kita bentuk nanti. Jadi terkait penyusunan kebijakan teknis, penyebaran system pertanian dan perbanyak benih sumber. Memang yang menjadi konsen nanti ke depan ini karena domain Kementerian Pertanian menjadi tugas penyediaan benih sumber itu menjadi ... bahwa kita harus menyiapkan benih mengantisipasi perubahan iklim terkait dengan benih tahan kering, tahan genangan, dan varietas-varietas lain yang memang dibutuhkan Kementerian Pertanian dalam rangka mensosialisasikan program Kementerian Pertanian.

Lanjut saja, *alhamdulillah* saya mendapat banyak informasi dari beberapa petani dan kelompok tani dan *alhamdulillah* kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin mendapat apresiasi yang cukup baik, arahan Pimpinan, saran, masukan teman-teman DPR RI, dan *alhamdulillah* kegiatan Denfarm kita dan perbenihan kita *alhamdulillah* cukup berhasil di berbagai tempat di 55 Dapil yang ada.

Lanjut terakhir yang anggaran, jadi ini kira-kira gambarannya Pak Ketua, Pimpinan, terkait anggaran yang akan kami alokasikan ke BRIN, yaitu Rp213 miliar. Ini pun memang masih ingin kita pertahankan Pak Pimpinan, karena ini banyak terkait dengan Bimtek Denfarm kita juga, karena itukan bukan sebenarnya di hulunya karena ini sudah implementasi. Kemarin itu tetap dianggap bagian dari BRIN dan akan diserahkan ke BRIN sekitar Rp213 miliar ini.

Itu mungkin Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pak Sekjen.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih.  
Kita lanjutkan Pak BPSDMP.

**KEPALA BPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Rekan-rekan sekalian Eselon I dari Kementerian Pertanian.

Baik langsung di halaman 5, di halaman 5 kegiatan prioritas Badan SDM Tahun 2022, jadi kita tetap fokus di pemberdayaan balai benih pertanian, termasuk di dalamnya adalah teknologi pertanian kepada 600 Poktan, 1000 Poktan, dan 5.749 DPP, kemudian juga pelatihan vokasi, baik untuk penyuluh maupun petani, penumbuhan petani milenial, kemudian juga pendidikan vokasi ada 7 Politeknik Pembangunan Pertanian, dan 3 SMK PP, kemudian juga penguatan data base, terutama data base SDM pertanian, terus pengawalan dan pendampingan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Badan SDM maupun bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, penguatan kelembagaan, pelatihan perdesaan swadaya atau (P4S), dan terakhir magang bagi petani dan penyuluh.

Terus langsung saja di halaman 12, ini adalah distribusi penganggaran untuk Badan SDM seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, bahwa Badan PSDMP mendapatkan alokasi anggaran Rp1,05 triliun kurang lebih. Untuk pendidikan dan pelatihan vokasi Rp754 miliar, sedangkan untuk itu sekitar Rp292 miliar. Nah, antara lain untuk insentif penyuluh, kemudian juga ada proyek PHLN, pinjaman dan hibah luar negeri ada 4 kegiatan, kemudian penyelenggaraan penyuluhan dan optimasi terhadap fungsi DPP, lembaga ekonomi petani, kemudian juga pengawalan pendampingan penyuluh, penyelenggaraan penyuluhan, Satker Dekon di 34 provinsi maupun yang kita lakukan sendiri.

Kemudian juga ada pelatihan vokasi, termasuk di dalamnya sertifikasi, penumbuhan usaha kemudian juga ada penumbuhan wirausaha muda pertanian. Dan ini nomor 11, penyelenggaraan Pendidikan vokasi bidang pertanian. Di sini memang ada peningkatan yang signifikan dalam hal volume dan anggaran, karena kita menampung para penyuluh yang baru saja diangkat menjadi ASN P3K, yang ijazahnya masih SMA atau SMK. Padahal Permenpan RB 35 Tahun 2020 mengamanatkan agar penyuluh pertanian itu minimal D3. Oleh karena itu, kita akan *upgrade* tingkat pendidikan para penyuluh yang

belum D3 itu ada 4.751 orang dari 11.500 ASN P3K Penyuluh Pertanian yang baru diangkat kemarin.

Nah, selain itu juga ada fasilitasi pembelajaran untuk SMKPP dan Bimtek. Dan yang terakhir adalah Dukman (Dukungan Manajemen) itu terdiri dari S2, S3 ASN Kementerian Pertanian yang tugas belajar, kemudian juga pelatihan bagi PNS, baik pelatihan dasar maupun di Diklat PIM 3 dan 2, dan dukungan lainnya. Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Dilanjutkan Bapak Kepala BKP, Plt. BKP silakan Pak.

**Plt. KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan semua Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan kami muliakan.

Bersama ini kami sampaikan rencana kegiatan dan anggaran Badan BKP. Di mana untuk 2022 di alokasikan sebanyak Rp445,9 miliar, terdiri dari program ketersediaan dan akses konsumsi pangan yang berkualitas sebanyak Rp360,7 miliar dan program dukungan manajemen sebanyak Rp85,2 miliar. Untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan yang berkualitas itu terdiri dari pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan itu ada Rp167,9 miliar. Kemudian ada pemantapan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan itu ada Rp71,5 miliar yang kegiatannya ada stabilisasi pasokan dan harga pangan, system distribusi pangan nasional, kemudian panel harga pangan pokok strategis, kemudian ada monitoring pangan.

Kemudian program yang ketiga pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Kegiatannya ini ada anggarannya Rp121,2 miliar. Terdiri dari pengentasan daerah rentan rawan pangan, kemudian penguatan cadangan pangan, pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan, kemudian pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pengembangan data pangan terintegrasi untuk penguatan system pangan, kemudian mitigasi bencana rentan rawan pangan, kemudian ada kegiatan ketersediaan pangan, dan penyusunan neraca bahan makanan untuk pengambilan kebijakan. Sedangkan untuk pemantapan panganekaragaman konsumsi dan pangan kegiatannya ada perkarangan pangan lestari (P2L), kemudian diversifikasi pangan, ada analisi situasi kebutuhan dan pola konsumsi pangan, kemudian

ada kegiatan penguatan keamanan dan mutu pangan segar, dan bimbingan teknis atau sosialisasi pada para petani.

Sedangkan program dukungan manajemen di sana ada gaji dan operasional perkantoran untuk 365 pegawai, itu ada Rp36,3 miliar. Kemudian dukungan manajemen pusat dan daerah Rp48,8 miliar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, interupsi sebentar setengah menit saja.

**KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

Iya, di interupsinya apa?

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Saya tadikan BRIN membintangi, apa namanya Litbang membintangi kan yang BRIN itu. Inikan BKP juga dibintangi kan ada pengalihan ke Badan Pangan Nasional. Saya mau tanya ada yang dibintangi nggak ini, kalau nggak dibintangi berarti kita bisa *carry over* semua. Saya mau tanya Pak Kepala ini.

**Plt. KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Untuk anggaran BKP sementara dibintang, kecuali untuk biaya gaji upah dan layanan perkantoran itu yang tidak dibintang. Alasannya dari Dirjen Anggaran adalah tidak mempunyai dasar untuk menetapkan anggaran BKP, karena berdasarkan Pasal 50 Perpres 66 Tahun 2021 bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, maka Badan Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi dengan berlakunya Perpres tersebut Badan Ketahanan Pangan dinyatakan gugur, kecuali untuk gaji pegawai. Silakan Pak, lanjutkan Pak.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Berarti perlu didalami sangat dalam RDP hari ini.



**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih.

Terakhir Pak Kepala Barantan, kami persilakan.

**KEPALA BARANTAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Ir. BAMBANG, M.M.):**

Terima kasih Pak Sekjen.

Yang terhormat Pimpinan,  
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ijin kami dari Badan Karantina menyampaikan program kegiatan strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2022. Ada dua program dari lima program Kementerian Pertanian sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi. Program yang pertama yang terkait dengan Karantina adalah program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dialokasikan sebesar Rp225,7 miliar. Dan program yang kedua adalah program dukungan manajemen dengan alokasi anggaran Rp781,4 miliar. Ini untuk membiayai kantor pusat, 52 UPT, dan 326, sehingga total alokasi anggaran tahun 2022 semuanya Rp1,007 triliun.

Adapun fokus kegiatan Badan Karantina Pertanian tahun 2022, yang pertama adalah pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tanaman karantina, hama penyakit karantina. Yang pertama adalah pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tanaman karantina, hama penyakit hewan karantina, pengawasan keamanan pangan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan SDM Badan Karantina yang terkait dengan Diklat fungsi dasar, kemudian penjenjangan, PPNS, saat ini sudah banyak yang pension termasuk inteligen sehingga kita perlu melatih terutama PPNS dan inteligen juga.

Kemudian penguatan daerah-daerah perbatasan ini sesuai amanat Impres Nomor 1 Tahun 2019 juga Inpres Nomor 1 Tahun 2021 terkait dengan percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan tahun 2022 dari 11 wilayah perbatasan kita bertahap ada 5, antara lain adalah Entikong, Tarakan, Kupang, Jayapura, Pekanbaru dan bandara-bandara baru jadi perhatian untuk penguatan kantor dan sarana prasarannya.

Kemudian yang keempat adalah penguatan pengawasan dan penindakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka pengawasan patroli bersama, operasi patuh, dan lain-lain. kemudian yang kelima adalah penguatan single data, integrasi IQ test kita. Kemudian yang terakhir adalah

akselerasi ekspor dalam rangka mendukung gerakan 3 kali lipat ekspor. Demikian Pak Sekjen.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih.

Demikian Pak Ketua, Pimpinan, dan Anggota yang kami muliakan.

Kami kembalikan kepada Bapak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Jadi aspek mendasar yang dari inikan bukan lomba pidato ini antar Dirjen ini. Dari paparan tadi yang pertama yang harus kita bersama-sama perjuangkan adalah agar kemitraan tidak bergeser dulu Pak, ini Pak Ichsan dan kawan-kawan. Misalnya Badan Ketahanan Pangan, jangan sampai satu kelembagaan di sini di sini nanti kemitraannya tidak di sini, kan gitu loh. Ini akan semakin memberatkan kembali.

Yang kedua, yang harus menjadi fokus perhatian kita itu adalah persoalan lembaga penelitian yang menghasilkan secara material bibit atau benih. Jangan sampai ketika pindah kelembagaan fokusnya tidak ke pertanian, fokusnya tidak ke perkebunan misalnya kan gitu, tapi fokusnya ke bidang riset yang lain. Pembiayannya nanti lebih besar untuk bidang riset yang lain, sedangkan bidang ini nanti menjadi terbengkalai, kurang mendapat perhatian. Ini harus diantisipasi juga secara teknis di Kementerian Pertanian, karena biasanya di Indonesia kalau sudah beda lembaga beda lagi ramuannya. Capain targetnya nanti berbeda lagi, padahal kita lagi berjuang untuk memacu diri agar peningkatan produktivitas pertanian meningkat. Terlepas dari berbagai kekurangannya masa pandemi sudah bisa kita lewati, tapi khususnya ketahanan pangan terutama beras relatif stabil, produksi panen terjaga bisa 3 kali. Karena apa? Karena berkahnya juga berkah dari alam, ngasih hujannya agak banyak, hujannya hampir sepanjang tahun. Kemudian masalahnya di mana? Pasti diuruskan pupuk itu saja, kan gitu loh urusan pupuk.

Nah, untuk itu biasanya ini juru bicara kita ini selalu terakhir, juru kunci yang membuka dan yang mengunci, tapi hari ini kok di awal. Apakah memang kuncinya hilang atau patah.

Silakan Pak Ichsan.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Adaptasi kebiasaan baru Pak.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Sekjen, Bapak-bapak Eselon I, dan para Pimpinan yang saya hormati, teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya ingin memulai terkait dengan anggaran yang ada di Litbang dan BKP. Tadi saya sudah interupsi sebenarnya, tetapi ini saya ingin melakukan satu pendalaman terkait bagaimana anggaran yang menurut Pak Kepala BKP dan Pak Kepala Litbang itu sudah dibintang, Litbang itu sebagian tetapi BKP itu hampir secara keseluruhan kecuali pegawai.

Nah, ini yang menjadi persoalan karena saya minta ini kemudian ditinjau ulang kembali terkait dengan perbintangan ini. Bukan bintang reformasi Pak, tapi perbintangan ini saya minta program-program yang ada itu kemudian coba diseleksi kembali. Karena sesuai amanah Undang-Undang bagaimana pun atau Undang-Undang Pangan terkait dengan Badan Pangan Nasional dan Litbang itu BRIN, kita tidak menutup ruang terkait dengan hal itu, tetapi kita minta agar itu diseleksi kembali. Ambil contoh misalnya di Litbang, Denfarm itu sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk Litbang, tapi kalau bahasa badan apa tadi namanya Badan Pengelolaan Sistem Pertanian, Denfarm itu kan sebenarnya bagian dari Badan Pengelolaan Sistem Pertanian Pak Fadry. Artinya, itu sesungguhnya jangan kemudian dibintang lalu kemudian di *carry over* ke BRIN, tapi cari yang lain yang sifatnya memang betul-betul riset. Tapi kalau yang Denfarm inikan sebenarnya pengembangan inovasi sebenarnya, bukan riset tapi memang implementasi, artinya ini perlu diseleksi kembali.

Saya minta nanti di dalam hasil rapat ini kita coba tinjau ulang kembali perbintangan ini, termasuk BPK misalnya Badan Ketahanan Pangan. Di situ ada toko tani, di situ ada kemudian program pangan lestari, perkarangan lestari. Itu kan sebenarnya kalau kemudian kalau memang toh harus *carry over* kita *carry over* saja. Misalnya di toko tani, toko tani itu kalau kemudian kita alihkan ke PSP kenapa tidak. Program perkarangan lestari kita alihkan memang sejenis di hortikultura misalnya kita alihkan saja, tapi harus diseleksi benar dua Pak kepala ini. Bahwa peralihan dari Eselon I Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional ataupun Litbang ke BRIN itu tidak menghilangkan esistensi pertanian.

Saya minta ini kemudian cabut bintangnya, lalu kemudian kita seleksi kembali. Mumpung kita masih punya waktu sekitar satu bulan lagi untuk melakukan seleksi ulang terkait dengan mana anggaran yang betul-betul untuk riset, mana yang memang betul-betul untuk implementasi. Program Perkarangan Lestari misalnya, itu melibatkan banyak orang di masyarakat. Teman-teman atau kita semuanya sudah memahami bahwa program perkarangan lestari ini memang efektif, tapi kalau kemudian ini dibintang di *carry over* ke tempat lain kita kehilangan banyak hal. Terus kemudian di Litbang program Denfarm tadi. Jadi saya minta ini ditinjau ulang Pak, jangan kemudian karena Dirjen Anggaran itu membintang lalu kita kemudian kita ikuti, jangan

juga dong. Harus tahu bagaimana cara mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas.

Jadi Pak Ketua, Ibu Ketua, saya ijin untuk program yang perbintangan ini kita perlu tinjau ulang kita cabut saja bintangnya itu tapi kemudian kita seleksi ulang. Bukan berarti bahwa mereka tidak kita kasih anggarannya, tidak. Kemudian Badan Pangan Nasional kita tidak kasih anggaran bukan berarti itu, tapi harus diseleksi ulang. Mana yang betul-betul program yang memang untuk kepentingan pertanian atau *stakeholder* pertanian atau bukan. Itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, Pak Dirjen Tanaman Pangan ini saya melihat ada produksi, ada ancaman produksi satu komoditi di tahun 2022 ini kita kehilangan banyak, yaitu jagung. Saya membaca tadi hasil presentasinya Pak Dirjen Tanaman Pangan tahun 2020 produksi jagung kita itu sekitar 35 juta ton, bukan begitu Pak Dirjen ya. Tahun 2022 katanya target produksi itu 20,1 artinya potensi kehilangan jagung produksi itu 15 juta ton. Saya mau tanya ini Pak Dirjen sebentar saja, kebutuhan jagung berapa setiap tahun, kebutuhan saja nggak usah panjang-panjang.

#### **DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih.

Data dari BKP dan PKH kebutuhan pakan ternak kami total semuanya termasuk konsumsi langsung 14,36 juta ton.

#### **F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

14, berarti kan sebenarnya tidak ada ancaman untuk kebutuhan tetapi problemnya terjadi kelangkaan hari ini. Di Dapilnya Ibu Ketua di Blitar ada kelangkaan jagung. Jadi saya minta ini Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dirjen PKH, coba atur bagaimana tata kelola ini. Jangan sampai ini kemudian tersubstitusi oleh produk yang lain terutama gandum. Di dalam kesimpulan kami itu harus dibedakan *food* dan *feed* untuk gandum itu saya setuju tetapi produksi jagung juga harus kemudian kita tingkatkan. Nah, ini saya minta penjelasan dari Pak Dirjen Tanaman Pangan dan Pak Dirjen PKH terkait bagaimana mengatasi problem pakan ternak di tahun 2022.

Yang terakhir yang ketiga, terkait dengan implementasi Undang-Undang Ciptaker terutama di Dirjen Hortikultura. saya minta gambaran di tahun 2022 seperti apa pengelolaan tata kelola komoditas hortikultura terutama bawang putih dan produk hortikultura yang lain terkait dengan Undang-Undang Ciptaker ini terutama RIPH ini. Apakah masih ada atau memang betul-betul memang sudah kita hilangkan. Ini minta klarifikasi untuk tahun 2022.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Ichsan yang telah secara komprehensif memberikan sebuah telaah. Dan biasanya kalau di kita itukan segala sesuatu itu bukan pada persoalan materi tapi di mana meletakkan angka. Jadi mungkin angka-angka itu kalau di situ dibintangi sebenarnya sebelumnya seharusnya diletakkan di Dirjen lain agar tidak kena bintang, karena biasanya kita inikan berbasis materi kelembagaan, isi materinya kan tidak pernah dipersoalkan. Nah, inikan yang implementatif itu bisa nggak digeser saja ke bidang yang lain. Yang penting tidak boleh hal-hal yang bersifat implementatif kemudian bergeser alokasi keuangannya menjadi yang bersifat riset atau bersifat pengelolaan kebadanan.

Ini pengingat dan itu urusan bintang, karena kemarin kan bintang 4 sudah ditetapkan jadi Panglima TNI. Dan Pak Ichsan itu sangat senang menghitung bintang karena laki-laki, kalau perempuan sangat senang menghitung bulan, ada bulan tua, bulan muda, dan ada telat bulan. Nah, ini urusan Ibu Renny kalau urusan bulan. Kelihatan Ibu Renny bulannya lagi bulan purnama, karena masih bulan muda.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (Hj. RENNY ASTUTI, S.H., S.PN.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Irjen, dan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Pertanian.

Dari paparan-paparan yang sudah disampaikan tadi, baik oleh Bapak Sekjen maupun para Dirjen ada beberapa catatan dari kami Fraksi Gerindra. Saya mewakili Fraksi Gerindra akan menyampaikan catatan dan tanggapan-tanggapan tersebut.

Yang pertama, untuk Pak Sekjen kami dari Fraksi Gerindra kembali menekankan sebagaimana bahan-bahan Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, yaitu bahwa Fraksi Gerindra akan terus berupaya untuk mengawasi dengan mengingatkan kepada seluruh Eselon I Kementerian Pertanian agar kegiatan Bimbingan Teknis, pelatihan atau sosialisasi kepada petani dapat dianggarkan secara optimal dan sesuai dengan petani dilapangan, karena Bimtek ini sangat dibutuhkan baik oleh penyuluh maupun oleh para petani. Ini saya juga mohon perhatian yang lebih untuk Bimtek ini.

Kemudian untuk Inspektorat Jenderal, kami juga meminta kepada Inspektorat untuk melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran dari yang diajukan di pagu anggaran meninjau pada laporan realisasi anggaran tahun 2021 triwulan I masih belum maksimal. Agar program penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian dapat lebih

maksimal mengingat dua instrument tersebut merupakan bagian penting dalam program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.

Yang selanjutnya untuk Dirjen PSP, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen PSP yang walaupun waktunya sangat pendek bersedia mendampingi saya Pak, saya ajak ke Dapil saya untuk melihat langsung lokasi pertanian yang menurut saya ekstrim ya Pak ya, karena memang Dapil saya Dapil yang ekstrim harus menaiki *speed boat* berjam-jam. Di Desa Daya Murni, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin. Dari kunjungan reses yang saya lakukan kemarin bersama Pak Dirjen saya sampaikan ke Bapak bahwa provinsi Sumatera Selatan ini adalah salah satu provinsi yang potensial untuk program lumbung pangan nasional atau *food estate*.

Akan tetapi memang kemarin yang disetujui itu hanya seluas 5.000 hektar kalau saya tidak salah Pak ya. Saya juga mohon Pak, karena memang di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Banyu Asin ini kita tahu bahwa Kabupaten ini adalah lumbung pangan nomor 4 nasional. Nomor 1 di luar pulau Jawa, ini Kabupaten Banyu Asin. Saya mohon di sini Pak, tadi saya lihat dari paparan-paparan yang Bapak sampaikan kepada slide halaman 11, rencana komitmen alokasi aspirasi Ditjen PSP tahun 2022, ini ada transportasi pertanian roda 3 tetapi dari rencana komitmen ini tidak disalurkan melalui aspirasi Anggota DPR RI. Nah, kemarin sebetulnya saya juga ingin mengajak Bapak langsung melihat kondisi sawah Pak, di Dapil saya. Nah, transportasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pak, karena memang lokasi sawahnya dengan lokasi perumahannya itu cukup jauh.

Kemudian untuk pompa air Pak, saya mendapatkan WA dari masyarakat petani di Dapil saya ucapan terima kasih untuk bantuan pompa. Akan tetapi dengan perubahan iklim yang ada sekarang pompa ini masih kurang efektif Pak, karena terlalu kecil Pak. Saat ini air sungai Musi sudah mulai meluap sehingga mereka juga tetap kekurangan Pak, besaran pompa ini sehingga sawah-sawah masih tetap terendam. Ini juga mohon perhatian ke Dirjen PSP.

Kemudian selanjutnya untuk Ditjen BUN terkait dengan replanting kelapa sawit. Sebetulnya di Dapil saya replanting kelapa sawit ini kurang diminati Pak, kenapa? Karena masyarakat petani atau pekebun sawit ini mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan ketika replanting ini. Nah, ini saya juga mohon kepada Bapak untuk lebih menanggapi keluhan para petani kelapa sawit ini bagaimana mekanisme pemberian bantuan program replanting tersebut. Jadi tidak hanya bantu untuk menebang saja Pak, tapi bagaimana membantu masyarakat juga untuk tetap mendapatkan penghasilan dengan adanya replanting ini.

Kemudian untuk Dirjen Hortikultura, sama Pak dari Dapil juga ini mengenai kondisi ketersediaan cabai rawit di Provinsi Sumatera Selatan ini ada juga terjadi juga di Provinsi yang lain terdapat defisit cabai rawit ini. Ini juga akan berpengaruh kepada implasi di beberapa provinsi. Saya juga mohon ini mendapat perhatian dan tadi Bapak juga menyampaikan mengenai anggaran alat pasca panen. Saya melihat di Dapil saya sendiri maupun dari kunjungan-

kunjungan dari Komisi IV DPR RI, ini alat pasca panen ini saya lihat ini kurang efektif Pak, karena ada beberapa daerah ini alat pertanian ini turunnya tidak ditempat yang seharusnya. Contohnya, kembalikan sebetulnya ini aspirasi saya juga Pak, rumah produksi cabai. Rumah produksi cabai saya sudah sampaikan kepada Bapak, saya kaget ketika kunjungan ke Kediri, ternyata Bapak sampaikan bahwa ada bantuan alat pasca panen untuk yang diberikan melalui aspirasi Anggota Dewan, tapi ternyata di Dapil saya tidak ada. Saya sudah cek tidak ada, dan Direktur Bapak, Bapak sendiri memerintahkan Direktur Bapak untuk komunikasi dengan TA saya. Ternyata alat pasca panen tersebut itu diberikan kepada Anggota yang saat ini sudah pindah di Komisi V DPR RI. Saya sudah 1 tahun lebih Pak, di Komisi IV DPR RI harusnya alat itu turunnya di Dapil saya tapi turunnya di Dapil orang lain. Dan saya sudah sampaikan ke beliau, ternyata beliau juga menyampaikan bahwa alat itu tidak ada Pak, di Dapil beliau di Banyuwangi. Ini saya sudah cek langsung Pak, jadi tolong Bapak nanti dicek lagi ini mengenai penyaluran alat pasca panen ini.

Kemudian selanjutnya yang terakhir ini untuk Balai Karantina Pertanian. Salah satu fokus kegiatan dari Barantan tahun 2022 adalah melakukan penguatan fasilitas karantina. Hal ini juga kami minta mendapatkan perhatian dari Balai Karantina Pak.

Itu saja tanggapan dari Fraksi Gerindra, nanti secara tertulis akan saya sampaikan.

Terima kasih.

*Billahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

**F-GERINDRA (Hj. RENNY ASTUTI, S.H., S.PN.):**

Izin Pimpinan ada yang ditambahkan dari Pak Darori.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Terima kasih.

Pak Ketua, Anggota, Pak Sekjen, dan para Dirjen yang saya hormati.

Jadi begini, tadi Pak Sudin menanyakan berapa sebetulnya realisasi kemampuan pupuk bersubsidi. Selama ini Kementan mengatakan cukup, cukup, cukup. Saya sering ditugasi oleh para Pak Ketua ini menerima tamu Anggota DPRD dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mengeluh pupuk

pupuk subsidi itu kecil. Saya sudah mendapatkan data bahwa dari Kementan ini, jumlah petani itu kurang lebih 14 juta. Yang mengajukan RDKK diusulkan 26,2 juta ton pupuk, berarti ini membutuhkan dana hampir Rp69 triliun. Kemampuan tahun 2020 anggarannya hanya Rp29 triliun berarti hanya 8,9 juta ton. Ini tolong jangan kita bohon lagi ke depan, katakan sejujurnya berapa sebetulnya kemampuan, ternyata kemampuan tahun 2020 hanya 35% pupuk bersubsidi Pak Sekjen.

Juga saya kira kita terus terang saja apa langkah selanjutnya. Mungkin rekomendasinya jangan semua jenis di kasih subsidi mungkin cukup padi, jagung, kedelai, misalnya jangan semua dikasih tapi nggak jelas. Seperti kami sawah 1 hektar itu jatahnya 70 kilo tapi lebih, di Kebumen itu di atas 100 kilo. Kalau seperti ini, ini kita kasihan teman-teman di daerah, para Kepala Dinas jadi tuntutan. Tadi Pak Sudin menanyakan tolong ini dijawab jujur jangan kalau ada apa cukup, cukup, tapi nggak ada realisasinya. Kami sendiri di Komisi IV DPR RI dikejar-kejar juga gitu. Itu satu.

Tadi Pak Dedi mengatakan juga soal pembubaran atau pengalihan tenaga dari Badan Litbang. Kemarin waktu kami di Bandung mengawal Pak Dedi kita diskusi dengan teman-teman, ternyata ini Dirjen Horti itu kerjanya banyak tapi UPT-nya kecil, sehingga rentang kendali antara dinas kabupaten ke Dirjen itu sangat jauh. Saya mohon kepada Ketua, karena di Balai Penelitian itu banyak UPT-nya saya kira UPT-nya itu dialihkan saja ke hortikultura. Uangnya ada, kantornya ada, orangnya sudah pengalaman, dan hortikultura akan lebih maju lagi.

Itu saran saya, saya kira mohon ini bisa dimasukkan kesimpulan. Kita mendorong terserah Kementerian mau nggak, saya kira mau ini kalau mau menolong horti. Horti ini rentangnya jauh sekali ke dinas-dinas, karena saya tanya kepala dinasnya nggak kenal Direktorat Jenderal Horti kok, karena terlalu jauh. Jadi saya kira kalau ada UPT-nya itu alangkah baiknya Pak Dedi.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kalau di dinas itu yang dikenal itu hanya dua Pak, Tanaman Pangan dan PSP. Horti itu nggak dikenal kecuali di tempat saya Pak, dikenal oleh istrinya kepala dinas itu teman SMP. Nah, agar seluruh harapan, keinginan dikabulkan ya nggak usah jauh-jauhlah kita pergi ke Mekkah, di sini saja cukup karena sudah ada Pak Ibnu Multazam. *Insha Allah* doa kita dikabulkan.

Silakan Pak.

#### **F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya banggakan, saya cintai Pimpinan yang baik hati, Pak Sekjen dan seluruh Direktorat Jenderal yang ada, Bapak-bapak, dan Ibu-ibu Anggota Komisi IV DPR RI.



Saya hanya menyampaikan gagasan apa yang disampaikan Pak Ichsan mengenai pembintangann terhadap dua Ditjen yang ada. Saya kira kalau itu pembintangan itu, inikan APBN inikan sudah definitive. Jadi anggaran Pagu Kementerian Pertanian inikan sudah definitive dan sudah kita ditetapkan di rapat Komisi IV DPR RI. Bisa membintang dan bisa bintang itu dicairkan, dihilangkan, itu pertama harus APBNP, APBNP. Nah, kalau itu APBNP kan lama, kalau digeser ke Kementerian yang lain katakanlah digeser ke badan yang lain itu prosesnya kalau tidak salah maaf kalau saya keliru, itu harus melalui pembahasan di Banggar besar, tidak cukup di internal Komisi. Saya setuju dengan saran Pak Ketua, dari pada anggaran itu menggantung itu Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Pak Menteri kembali untuk menggeser alokasi antar kamar, antar Dirjen, jadi digeser saja antar Dirjen, sehingga anggaran itu masih di Kementerian Pertanian. Persoalan penggunaannya dan kendalinya apakah masih tetap di Litbang atau di Badan Ketahanan Pangan itu persoalan kendali, tetapi anggaran itu digeser dalam Rapat Kerja dengan Menteri itu di Dirjen yang lain. Terserah apakah di Sekjen, apa di mana ya, di mana sajalah kira-kira bisa atau di holtikultura boleh. Nah, itu diproses dengan Rapat Kerja dengan Menteri. Kalau itu tidak digeser saya kira itu anggaran itu akan menggantung, menunggu saatnya matang lalu dipetik oleh orang lain, saya kira gitu.

Yang kedua Pak Ketua, kaitanya dengan tadi yang menyampaikan masalah pupuk Pak Darori. Tahun 2022 itukan subsidi pupuk itukan relative tetap Rp25 triliun koma sekian. Ada pikiran-pikiran yang ingin mencabut beberapa *item* atau apa namanya pupuk bersubsidi itu, apakah itu Urea, apakah itu ZA, apakah itu organic, dan lain sebagainya. Tapi PKB berpendapat, kita dari Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI itu jangan membuat kebijakan yang ekstrim dan radikal. Jangan membuat kebijakan yang ekstrim dan radikal, karena beban petani inikan hari inikan semakin berat dengan kurangnya atau kekosongan pupuk bersubsidi di lapangan.

Nah, sebaiknya kita meniru pengurangan subsidi itu dari Pertamina lah, itu apa namanya yurisprudensi yang baik, yurisprudensi yang bijaksana. Pengurangan subsidi premium itukan kita saja kan tidak terasa kalau subsidi premium itu dicabut. Coba sekarang cari persediaan premium di SPBU itukan hanya sedikit dan cenderung kosong, diganti oleh pertalite. Nah, pertalite itukan nonsubsidi, walaupun mungkin kualitasnya pertalite dan premium itu ya mirip-miriplah. Untuk itu PKB mengusulkan kalau ini Kementerian setuju tidak membuat kebijakan ekstrim dan radikal, itu lebih baik dinaikkan HPP-nya sehingga kuota nasional yang mungkin dengan Ro25 triliun itu 7juta ton atau lebih sedikit. Tetapi kalau HPPnya itu dinaikkan itu akan lebih banyak bisa 8 juta ton, tergantung kenaikan kenaikan apa HPP masing-masing *item* pupuk. Yang terjadi hari ini di lapangan setelah pupuk subsidi itu relatif kosong itukan muncul pupuk nonsubsidi dan harganya disparitasnya sangat jomplang sekali, kualitasnya belum tentu terjamin.

Ya dilab ya dilab lah dan namanya itu di mirip-miripkan, misalnya ada Phonska subsidi yang nonsubsidi Ponsika. Inikan sebenarnya ada upaya untuk semacam menyamakan antara produksi dalam negeri Petro atau yang lain pupuk Indonesia dengan impor. Kita tahu bahwa impor itu pupuk curah

awalnya, kita tahu persis bahwa impor itu adalah pupuk curah yang dikapalkan dari negara asal, saya tidak usah nyebut negaranya. Sampai di pelabuhan dan sekitarnya itu di apa dikarungi atau dikemas dengan diberi nama hampir mirip, hampir mirip-mirip. Nah, untuk itu biar harga nonsubsidi dan harga subsidi ini semakin dekat itu mengusulkan tanpa membuat kebijakan yang ekstrim dan radikal itu dinaikkan saja HPP-nya. Saya kira petani maulah, petani bersedia untuk menerima kenyataan, menerima kenyataan bahwa kalau HPP tetap pasti nanti pada bulan-bulan tertentu ada kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, tetapi ketersediaan di lapangan nanti adalah pupuk nonsubsidi.

Itu saya kira Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf, terima kasih.

*Wallahu muwafiq Ila Aqwamith Thariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih Pak Ibnu Multazam yang mewaliki Fraksi PKB, pasti doanya dikabul. Dan saya baru dekat ini, ternyata langkah PKB akan diikuti oleh langkah PAN, untuk sama-sama bergabung diurusan pupuk. Sama ini, silakan Pak Haerudin. Pak Haerudin dari PAN atau dari mana asalnya? Dari PAN Partainya.

Terima kasih.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Tidak ada yang mengganti, masih ada harapan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota yang saya hormati,  
Pak Sekjen beserta seluruh Eselon I dari Kementan yang saya hormati.

Pertama, ingin kami sikapi persoalan isu jagung yang kemarin lalu Pak Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Inikan kalau kita menyajikan data di publik sampai kita debat, sampai saling klaim ada dan tidak ada, sampai tidak ada juntrungannya akhirnya, dan kita harga jagungnya naik begitu, hari ini mahal dan indikasinya jagung tidak ada. Sejatinya ini data kita memang butuh untuk fix data ini. Butuh kita sebuah kenyataan apa namanya itu stok kita itu betul-betul aman, karena yang terdampak itu masyarakat luas. Kalau Kementan menyatakan bahwa kami aman beras, aman jagung, tidak butuh impor dan segala macam, psikologis masyarakatnya aman merasaan aman, pada saat tidak ada itu yang jadi masalah. Yang dipikirkan oleh kita adalah dari jagung itu bukan hanya petaninya, tapi yang yang terdampak dari pemanfaatan jagung itu, ada pakan dan yang lain, itu jadi korban semua. Dan itu tanggung jawab secara politik, tanggung jawab Kementan. Kalau memang itu datanya bohong

Kementan itu harus bertanggungjawab secara politik dan tanggungjawabnya adalah mundur dari Menteri. Inikan kebohongan publik kalau itu memang itu sampai tidak bisa dibuktikan.

Yang kedua, persoalan pupuk. Kita ingin sampaikan beberapa hal ya, pupuk itu problemnya dari mulai RDKK itu problem. Kedua, dari persoalan penghitungan kita ketersediaannya juga problem, masalah juga. Penyaluran juga masalah juga, apalagi kalau tambah beban kalau kata Pak Ibnu Multazam tambah PHH-nya naik tambah masalah juga. Dulu kita pernah berdebat apa mungkin semua yang berhak atas pupuk itu akan kebagian pupuk subsidi. Pak Dirjen waktu itu ngotot pasti kebagiaan tapi kita semua di Komisi IV DPR RI ragu tidak mungkin kebagian, karena e-RDKK kita datanya tidak tepat. Kedua, dari sejumlah kebutuhan kita yang dihitung oleh Pak Darori tadi yang seharusnya kita 12 juta ton kita hanya mampu 7 ton, artinya berapa kekurangannya. Itu juga sudah jadi masalah dan jadi pemisah keyakinan antara kita di Komisi IV DPR Ri tidak mungkin ini bisa subsidi bisa menutupi kebutuhan kita semua. Tapi walaupun begitu kita kan tetap berjuang.

Dan kita dari PAN bersetuju, Fraksi Amanat Nasional bersepakat, bersepaham mungkin dengan cara pandang apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Multazam tadi. Jadi Komisi IV DPR RI itu tidak berhitung varietas, tapi mendorong bahwa subsidi itu harus hadir, wajib hadir, negara harus hadir pada saat rakyat membutuhkan. Kalau tadi ada dorongan bahwa cukup tanaman pangan saja urusan subsidi kita konsentrasi, saya pikir di daerah-daerah yang bukan tanaman pangan dan itu rakyat kecil yang butuh pupuk subsidi dia butuh Ponska, dia butuh cetak, sementara dia juga tidak punya kemampuan untuk beli. Itu juga hadir karena memang hortikultura dan tanaman pangan daerahnya berbeda. Contoh di daerah Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Cikajang, padi bukan basisnya tapi di situ orang nanam sayur semua, nanam kentang semua dan di situ rakyat kecil, dan mereka butuh subsidi. Bukan Urea yang dibutuhkan tapi bisa jadi Ponska.

Ini juga hitungan-hitungan ini kita berserah kepada Kementan, mana yang tepat yang penting subsidi tepat untuk rakyat, itu urusan pupuk subsidi kita. Kalau yang dari sisi yang kita mau berhitung baik, justru kita berdebat persoalan organik, non organik. Saya berharap Kementan itu menghargai betul dan menjaga betul apa keyakinan dari Kementan. Contoh, Litbang Kementan meyakini bahwa kita sudah rusak dan kita butuh organik untuk memperbaiki tapi diperjalanan organik mau kita lepas dari subsidinya, padahal rakyat butuh itu. walaupun rakyat tidak mengerti karena dianggapnya organik itu adalah menimbulkan hama tanaman atau tanaman-tanaman yang liar itu tumbuh, itu karena tidak paham mereka. Justru mereka itu harus dipahamkan oleh kita, organik itu dibutuhkan karena hara tanah kita sudah rusak.

Saya berharap Kementan Kementa yakini itu dan perjuangan itu, jangan seperti kasus ecaliptus. Ecaliptus diyakini oleh Kementan ini adalah penawar virus, bisa mengencerkan kekentalan dahak, pori-pori nafas kita, tapi diperjalanan nggak yakin Kementan. Kenapa begitu? hasil ilmu kenapa nggak yakin kita dengan ilmu kita ini. Saya berharap di sisi keorganikan kita berharap ada keyakinan di Kementan tentang ekaliptus. Jadi tidak ada asal-asalan, kita

justru bertanggungjawab dari mulai ilmu sampai tingkat pertanggungjawaban politiknya. Nah, itu yang paling penting mungkin yang kami bisa tanggap dari beberapa isu yang ada di Kementerian Pertanian hari ini. Urusan bahwa mengalihkan alokasi antar Dirjen, kita bersepakat harus ada Rapat Kerja Pak Ketua, satu kali di masa sidang ini untuk menyeleksi dari anggaran-anggaran tadi yang saudara Ichsan sampaikan.

Yang terakhir Pak Dirjen Kebun, daerah kami daerah banyak teh rakyat yang memang rusak biar lebih produktif lebih baik kita dorong rehab. Dan kami di Tasik Selatan, di daerah selatan dan di daerah Garut Selatan Sinar Jaya memang arealnya sampai 500 hektaran untuk direhab ini untuk kepentingan petani kita biar makanlah hari ini. apakah bongkar sendiri, modalnya tidak ada mau kita bantu rehab perkebunan teh rakyat.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

Sudah selesai dari Fraksi Amanah Nasional. Dan Pak Haerudin itu representasi PAN yang sangat mengerti di bidang pangan. Mudah-mudahan nanti kalau bergabung Badan Ketahanan Pangan bisa dipegang oleh Bapak. Kita doakan agar kita mudah menyampaikan proposal.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, yang belum punya harapan karena belum bergabung.

Silakan.

#### **F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat dan Pak Sekjen, serta para pejabat Eselon I.

Saat ini kita menghadapi bahwa terjadi ketidakseimbangan harga pangan dan kebutuhan. Seperti yang dikeluhkan oleh peternak, di mana harga jagung terlalu tinggi. Tidak equilibrium dengan kebutuhan biaya tenaga bagi peternak. Saya melihatnya ini terjadi karena pasokan jagung tidak cukup di pasar. Kalau pasokan tidak cukup di pasar maka pasti kenaikan harga terjadi, kalau penawaran banyak pasti harga turun. Kontradiktif yang dikatanya tadi Pak Dirjen, faktanya harga jagung di atas Rp5.000.

Kemudian alokasi anggaran untuk 2022 yang kemarin jagung itu kita alokasi kurang lebih 1 juta, sekarang ini jauh turun menjadi 392.000 hektar. Jadi logikanya kita ingin stabilkan harga jagung tapi tidak mendorong produksi, mana mungkin. Olehnya itu, saya melihat saya minta kepada Pak Dirjen, Pak Sekjen, tetapi apa namanya alokasi jagung ini pertahankan minimal sama dengan 2021, karena kalau tidak misalnya 6.000 menjerit bagi peternak.

Yang selanjutnya, BKP (Badan Ketahanan Pangan). Kita sudah tahu Keppresnya bahwa ini akan hilang ini badan ke satu badan yang mandiri bukan lagi di Kementerian Pertanian. Tapi kenapa kita alokasikan anggaran kesana, anggarannya Pertanian. Ini yang menurut saya tidak rasional lagi, karena Rp14 triliun ini memang dialokasi untuk di Kementerian Pertanian bukan Badan Ketahanan Pangan yang Keppresnya baru itu. dalam Keppres itu jelas bahwa Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian akan hilang, tapi kita alokasikan anggaran kesana. Jadi saya pikir seluruh alokasi anggaran yang ada di BKP itu kita alokasi ke Ditjen-Ditjen yang membutuhkan. Dan programnya yang memang tersangkut dengan kepentingan hajat orang banyak ya bawa ke Dirjen-Dirjen yang sesuai katakanlah tadi pada P2L itu, Dirjen Horti.

Seperti juga dengan Balitbang, kalau seluruh Litbang anggaran Litbang di 40 Kementerian masuk di BRIN besar sekali ini Pak. Jadi ini juga Balitbang sama halnya. Pertanyaan saya ke Balitbang adalah UPT yang ada di daerah itu, ini betul sangat kita dibutuhkan. Apakah nanti ini betul-betul tidak bisa dipertahankan, apakah harus masuk di BRIN. Kita perlu jawaban ketegasan, apakah bisa bertahan ini UPTD Balitbang yang ada di daerah ataukah memang harus masuk di BRIN. Kalau masuk di BRIN kita perlu langkah berikutnya untuk menciptakan apa namanya kepentingan Kementerian Pertanian di daerah.

Yang selanjutnya adalah PSP, saya kira kalau pupuk menjadi persoalan nasional. Kita di Panja Pupuk masih berkitik untuk mencari solusi yang tepat. Kita juga di internal masih berdiskusi, tapi saya kira kita akan menemukan solusi yang sama-sama kita harapkan nantinya, walaupun kita belum di sini belum kita bisa jelaskan secara menyeluruh. Tapi memang kita pahami bahwa persoalan pupuk ini banyak alternatif dan asumsi yang bisa kita lakukan. Salah salah satunya termasuk menaikkan harga supaya antara pupuk subsidi dengan nonsubsidi jangan terlalu jomplang.

Pupuk penyanggah saya kira perlu juga seperti pupuk organik ini juga diharapkan petani. Minimal ini yang diberikan kepada petani untuk menjadi pengobat hatinya lah. Katakanlah tanaman-tanaman yang sesuai yang cocok dengan pupuk organik, katakanlah jagung bisa, kemudian tanaman lain, dan tanaman horti bisa. Untuk apa namanya lebih mengobati pada petani. Anggarannya agar diperluas barangkali kalau bisa.

Terakhir adalah Alsintan, saya apresiasi Kementerian Pertanian memang Alsintannya sampai ke daerah, kita terima dengan baik, dan dinikmati oleh masyarakat. Lebih bagus lagi Pak, kalau Alsintan ini dialokasikan berdasarkan kebutuhan lokal. Kadangkala di satu wilayah tidak cocok dengan jenis ini kita gantikan dengan ini, supaya lebih tepat tidakada lagi Alsintan yang nganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lokal itu. Saya kira ini Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):**

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

*Wa'alaikum Salam.*

Baik, selanjutnya Ibu Maria.  
Silakan.

**F-PDIP (MARIA LESTARI):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang saya hormati para Eselon I dan Pak Sekjen.

Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kementan dalam upaya kegiatan program PKH dalam Alsisntan itu. Mengucapkan terima kasih atas Alsintannya yang sudah hadir, baik di Dapil kami maupun Dapil kawan-kawan mungkin. Dan saya juga mencermati dalam program kerja Kementerian Pertanian apalagi temanya sendiri ini pemulihan ekonomi reformasi dan struktural. Nah, saya harapkan program tersebut memang disesuaikan dengan fakta dan data yang ada dan fakta di lapangan. Apalagi dengan prioritas nasional dan program prioritas tersebut dalam peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Saya harapkan ini kegiatan dan program tersebut memang disesuaikan di daerah masing-masing untuk daerah di seluruh Indonesia. Apalagi ini programnya sudah ada program utama Kementan 2022, saya harapkan ini targetnya juga memang harus tercapai dan harus memenuhi kebutuhan kehidupan rakyat Indonesia.

Untuk data yang ada harus benar-benar Pak, jangan sampai ini data bukan data valid. Apalagi dengan adanya kemandirian benih, saya harapkan benih-benih yang ada di kita ini termasuk benih yang baik. Apalagi dengan adanya kerja sama dengan BPTP yang ada di seluruh Indonesia, ini saya meminta kerja kerasnya dan nanti harus ada kerja sama yang baik di daerah masing-masing apalagi provinsi. Dengan kerja sama Pemerintah Provinsi saya harapkan program dari Kementerian Pertanian, memang selaras kepada daerah provinsi yang ada di Indonesia.

Nah, pertanyaan saya apakah inisiatif Balitbang Kementerian Pertanian untuk melakukan inovasi perbenihan, agar suatu saat kita mandiri dan berdaulat dalam hal benih. Apakah Kementerian memiliki bank genetika benih lokal warisan dari kekayaan budaya pertanian nusantara. Dan apa saja benih lokal kita yang hilang. Apa yang dilakukan untuk mendukung petani kita untuk memuliakan dan memproduksi sendiri benih unggul sendiri. Nah, kualitas produk ditentukan oleh benih yang unggul, berkualitas, dan sesuai konten lokal. Jangan sampai petani hanya dimanfaatkan sebagai objek dalam perdagangan benih. Tak lagi mampu menyediakan benih secara mandiri dijadikan

ketergantungan dan tidak lagi berdaulat atas benih mereka. Nah, saat ini lompatan yang sangat besar di mana pola budaya pertanian digeser menjadi pola agro bisnis dan industri pertanian. Ini memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu bergantung pada ... dan ...

Kedua, apakah kami bisa mendapat data-data korporatif sehingga *food estate* yang sudah berlangsung dari tahun yang lalu, terutama data mengenai dampak produksi pangan dari *food estate* bagi kesejahteraan petani sekitar kemajuan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan supply bagi kebutuhan pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Nah, ini sangat penting agar menjadi perhatian kita semua untuk menjadikan evaluasi demi perbaikan ke depan.

Saya juga mencermati juga untuk program Kesekjenan. Saya melihat ada rincian dibuka di halaman 21, rancangan program dan kegiatan utama Sekretaris Jenderal dari halaman 21 ini kolom 6, pengelolaan kearsipan dan tata usaha rumah tangga dan pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian. Nah, ini alangkah baiknya dengan nilai tersebut saya harapkan ini benar-benar dikelola dengan baik dan benar agar masyarakat juga tahu apa yang dikerjakan oleh Kementerian selama ini. Itu saja Ibu.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.  
Pak Andi Akmal silakan.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):**

Terima kasih Ibu Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Sekjen beserta dengan Dirjen jajarannya Eselon I Kementan.

Yang pertama dari Fraksi PKS akan memberikan beberapa tanggapan. Pertama, mengenai masalah target ya Pak Sekjen, kita lihat target produksi komoditas utama untuk tahun 2022. Kalau lihat dan kita bandingkan dengan pencapaian tahun 2000-2021 ini mengalami penurunan. Misalnya padi, jagung ini penurunan, begitu pun dengan gula ya ataupun kopi. Mungkin ada hubungannya dengan penurunan anggaran dari Kementan yang cukup drastis ini Pak Sekjen. Mungkin ada penjelasannya ini perlu karena Bapak juga bisa menjelaskan kepada publik, kenapa misalnya produksi kita misalnya tidak naik karena anggarannya dipangkas. Jadi perlu disampaikan ke publik Pak Sekjen, Pak Presiden inikan cuma bisa mengatakan tidak ada peningkatan tapi

anggarannya dikurangi terus inikan tidak adil sebenarnya. Itu yang pertama Pak Sekjen.

Yang kedua, 2 tahun terakhir ini perlu kita mengevaluasi yang namanya bantuan Ibu Ketua, aspirasi ya. Kalau kita melihat selama ini Dirjen PSP dengan Alsintan saya kira cukup bagus Pak, dilanjutkan kembali Pak Ali Jamil ya, saya kira cukup bagus Pak. Dan saya sepakat tadi dengan Pak Suhardi Duka, bahwa harus memperhatikan usulan dari Anggota Pak, khusus untuk 55 Anggota Komisi IV DPR RI Pak Sekjen. Jadi ini kita tidak ingin nanti Anggota menerima bantuan dari Dapilnya yang tidak dibutuhkan.

Nah, yang perlu perhatian ini saya nggak mendengarkan tadi presentasi dari Inspektorat ya. Ini pengawasan internal Pak, terutama pengadaan bantuan benih dan bibit, termasuk ternak nih. Ini saya kira banyak yang kita alami di lapangan tidak sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Misalnya benih jagung, misalnya Pak DirjenPak Wandu ya, ini saya kira bagus niatnya karena petani kita itu sudah pintar nih. Mereka ini merk-merk jagung yang tidak biasa mereka tanam dan tidak bagus mereka tolak itu. Nah, kedepannya saya kira ini evaluasi bagi kita untuk 2022 Pak Wandu dan yang lain-lainnya. Kita perlu mendengarkan usulan apa namanya benih dari Anggota khusus 55 Anggota, yang lainnya terserah Bapak lah karena inikan masalah kemitraan kita, gitu ya.

Nah, khusus untuk yang tahun depan Ibu Ketua, masalah bantuan pupuk organik. Ini perlu kita hati-hati ini, karena di lapangan kan terdengar bahwa pupuk organik ini siapa yang menjamin kualitasnya, iya kan. Nah, inikan merknya kan sangat banyak sekali nih. Tahun depan anggaran cukup besar ini perlu perhatian dari kita semuanya nih terutama Pak Dirjen yang membawahi ini. Bagaimana memastikan bahwa kualitas bantuan pupuk organik itu betul-betul bagus, bukan sekedar pengadaan saja. Dan memperhatikan usulan dari Dapil juga Pak Direktur Jenderal. Jangan tiba-tiba di Dapil kita ini perlu pupuk organik kita nggak tahu dari mana ini. Ini saya kira perlu menjadi perhatian dan termasuk juga yang lainnya. Sehingga ada kebijakan afirmasi Pak, ada perhatian dari Kementan terhadap mitra yang ada di Komisi IV DPR RI.

Nah, kemudian yang untuk Dirjen PKH. Pertama, mengenai masalah apa makannya pakannya Pak Dirjen, saya kira ke depannya perlu dipikirkan pakan. Tetapi sisi lain sebagainya bagi Kementan ini harga bagus, bagus untuk petani cuma untuk peternaknya ini yang tidak bagus. Ini perlu ada keseimbangan saya kira ya Pak ya, perlu keseimbangan sehingga petaninya dapat harga yang bagus dan tentunya peternak juga dapat harga yang bagus.

Terima kasih juga tentunya Pak Dirjen PKH, bagaimana pembelian dari pada produksi ternak kita Pak, misalnya apa namanya pada saat produksi petani kita, apa peternak kita dagingnya ini ataupun telurnya ini ada yang belu. Ini perlu ada perhatian dan juga perhatian kepada daerah-daerah penghasil Pak Dirjen, misalnya di Dapil saya itu Bone termasuk kabupaten nomor 4 Indonesia penghasil daging sapi. Kira-kira tahun depan itu apa program yang bisa kita bantukan selain yang sudah regular Pak ya, yang regular inikan sudah ada bantuan semennya, sudah ada bantuan lainnya. Tapi apa daerah-daerah penghasil sapi, penghasil kerbau, penghasil babi misalnya yang teman-teman



Indonesia Timur atau penghasil lainnya, kuda ini perlu ada perhatian Pak. Sehingga klusterisasi apa namanya ternak ini kelihatan dan ada perhatian dari Kementan.

Dan terakhir saya sepakat tadi dengan siapa namanya Pak dari PKB tadi siapa namanya, pindah-pindah komisi Pak Multazam, bahwa harus ada solusi ini Pak Sekjen. Bagaimana tadi anggaran yang dibintang ini, ini bisa kita carikan solusinya sehingga kembali ke Kementerian Pertanian. Jangan sampai ini tidak bisa digunakan karena di situ juga banyak program Pak Sekjen. Banyak aspirasi yang berkaitan dengan masyarakat kita di Dapil.

Saya kira demikian pandangan dari saya Ibu Ketua, mungkin dari Fraksi PKS ada yang lain tambahkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Andi.  
Selanjutnya Ibu Yessy.

**F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):**

Baik, terima kasih Ibu Ketua dan Pak Ketua yang luar biasa.

Yang saya hormati teman-teman juga Anggota Komisi IV DPR RI,  
Pak Sekjen Kementerian Pertanian beserta Eselon I.

Kali ini kita RDP kembali mewakili dari Fraksi Partai Nasdem, ada beberapa hal yang kami sudah buat catatan untuk penguatan koreksi dan untuk lebih baik ke depan dari Kementerian Pertanian. Yang pertama, kami dari Fraksi Nasdem melihat dan memantau bahwa memang saat ini perubahan cuaca, perubahan iklim yang luar biasa terjadi di Indonesia. Ini juga sudah menjadi isu yang sangat strategis pada saat ini. Dan kebetulan juga di salah satu dapil kami di 5 Kabupaten Dapil saya itu semuanya sangat terdampak Pak Sekjen. Dan tentu kami juga meminta, mendorong kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini segera berkoordinasi, segera melakukan sinergisitas dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, dan juga dengan Pemerintah Daerah di setiap wilayah Indonesia yang memang sudah sangat berdampak akan perubahan cuaca ini. Karena pasti akan banyak sekali infrastruktur-infrastruktur pertanian, penunjang pertanian kita, bahkan juga perkebunan rakyat, kemudian sawah masyarakat juga banyak yang terdampak dari perubahan cuaca yang saat ini sedang terjadi.

Dan kemudian yang kedua, kami juga menyikapi soal fenomena eksternal yang ini juga terjadi dari negara luar. Salah satunya adalah flu burung yang saat ini sudah mulai kembali di Inggris dan sudah juga menyasar ke beberapa negara di Eropa. Dan terakhir juga terkait wabah demam babi atau ASF yang juga sudah masuk ke Indonesia. Dan kebetulan kemarin Pak Dirjen PKH juga bersama-sama dengan saya mengunjungi Dapil kami di Kalimantan

Barat yang kebetulan Kalbar adalah salah satu provinsi terbesar penyumbang produktivitas daging babi.

Dan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas langkah cepa, gesit, dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen PKH yang sudah turun langsung juga memberikan beberapa bantuan berupa serum untuk babi yang masih dalam kondisi fit. Dan kami juga berharap dalam situasi seperti ini teruslah PKH, Barantan bekerja semaksimal mungkin dengan Tupoksinya untuk meminimalisir masuknya wabah-wabah dari luar. Apalagi kalau berbicara ASF kemarin terindikasi juga bahwa salah satu penyebaran bisa masuk ke Indonesia itu melalui makanan-makanan ekspor-impor itu, ya ini yang sangat berbahaya bagi kita. Dan pada titik tersebut kami berharap dengan sangat kepada Barantan sekiranya memaksimalkan menjalankan fungsi *food safety*-nya dengan sangat baik. Karena ini juga menjadi garda terdepan dalam proses mensterilisasikan Indonesia dari wabah yang dikirim dari luar.

Kemudian yang ketiga, kami Fraksi Nasdem juga menyambut baik terkait beberapa kami melihat pemaparan itu ada adopsi inovasi teknologi dan digitalisasi pada konsep pertanian. Contohnya ada di *food estate*, kemudian di korporasi perkebunan, dan ada di Itjen kami menemukan ada apa ini aplikasi Gowas ya. Ini kami memang menyambut baik tetapi menekankan kembali bahwa sekiranya adaptasi ini betul-betul bermanfaat. Dan kami juga ingin meminta penjelasan lebih lanjut terkait adopsi teknologi ini, karena Fraksi Partai Nasdem juga salah satu yang sangat konsen untuk mendukung digitalisasi, modernisasi, dari pertanian itu sendiri. Dan juga penguatan untuk generasi muda bisa lebih tertarik dan terlibat di sektor pertanian.

Kemudian yang terakhir kami juga melihat progres dan upaya dari BPSDM Pertanian untuk selalu meningkatkan, untuk selalu meng-*upgrade* kemampuan-kemampuan dari SDM, dari penyuluh pertanian dan lain sebagainya. Dan di halaman 13 di poin 11, kami melihat ada salah satu ini program penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pertanian. Ini termasuk tadi Pak Dedi Kepala Badan sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan bahwa ada 11.315 orang penyuluh dan separuhnya ini bisa dibilang menggantung ya posisinya sampai sekarang, belum jelas juga kepastiannya karena mereka perlu penyesuaian Pak ketua dan Ibu perlu penyesuaian untuk bisa di-*upgrade*. Karena kalau melihat dari peraturan yang dikeluarkan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020 itu menyebutkan bahwa penyuluh dari P3K itu wajib minimal D3. Sementara ini separuh kurang lebih 4.000 lebih merupakan lulusan SMK atau SMA. Nah, ini jadi kendala juga bagi kita sementara kita tahu bahwa di komisi ini juga setiap saat setiap Rapat Dengar Pendapat, setiap Rapat Kerja bersama Menteri juga penyuluh tidak pernah ketinggalan untuk menjadi keluhan, menjadi hambatan di lapangan. Karena mengingat penyuluh adalah garda terdepan juga di sektor pertanian yang bisa menjembatani petani dengan kita, dengan Pemerintah.

Jadi harapan kami ini bisa mendapat penguatan dan dukungan dari kita bersama. Dan dipastikan bahwa anggaran ini harus tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat maksimal untuk penguatan para penyuluh kita yang ujung-

ujungnya adalah produktivitas pertanian kita diharapkan bisa sangat maksimal. Mungkin itu saja Ibu Ketua dari Fraksi Partai Nasdem.

Terima kasih atas waktunya.

Selamat siang.

**KETUA RAPAT:**

Selamat siang.

Selanjutnya Neng Ema dari Fraksi PPP, ini terakhir ya.

**F-PPP (EMA UMMIYATUL CHUSNA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Pak Sekjen beserta Bapak-bapak Eselon I.

Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami menyampaikan beberapa saran dan masukan. Yang pertama, terkait dengan evaluasi pelaksanaan program tahun 2021, mengenai bantuan ternak berupa sapi atau kambing. Kami mengusulkan evaluasi untuk teknis pengadaannya. Kami menilai pengadaan melalui sistem lelang yang saat ini dilakukan banyak sekali kekurangan, seperti kondisi ternak yang disalurkan kondisinya memprihatinkan. Terutama kambing ini kemarin dari Dapil kami menerima kambing yang sangat kecil dan ada beberapa yang mati. Yang kedua, untuk sapi satu kelompok itu jenisnya beda Pak, jadi yang 8 ini untuk sapi 8 ini bagus untuk bibitnya yang sisanya ini jenis yang biasa. Jadi ini juga kami juga minta nanti bagaimana ini yang benar bagaimana, sehingga kok tidak sama. Kami mengusulkan pengadaan penggunaan sistem penunjukan langsung seperti pengadaan benih.

Lalu mengenai program bantuan ternak unggas, kami berharap di tahun 2022 paket bantuan tidak hanya berupa bibit-bibit unggas, namun juga ditambah dengan bantuan pakan. Kondisi saat ini masih dalam masa pandemi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, sementara harga pakan mengalami kenaikan akibat harga jagung yang mahal. Dan yang terjadi di beberapa daerah calon penerima bantuan ternak unggas mengundurkan diri, karena khawatir tingginya resiko kegagalan program bantuan ternak unggas, disebabkan tidak mampu membeli pakan. Ini mohon koreksi untuk tahun 2022, karena ini juga harus terserap di tahun 2021. Jadi kami berupaya nanti memberikan ini kepada dinas saja.

Yang kedua, terkait evaluasi program pelaksanaan P2L. Banyak kendala yang terjadi di lapangan, Dinas Ketahanan Pangan di provinsi selalu penanggungjawaban Satker anggaran terkesan mempersulit kelompok dengan aturan-aturan yang tarik ulur. Kami mohon Pak, jadi dari provinsi untuk Juklak-Juknisnya juga lebih diperjelas, karena hasil dari di lapangan begitu kita

verifikasi terkait dengan kelompok-kelompok yang bersedia menerima bantuan P2L ini ada beberapa kendala. Jadi untuk kendalanya di kelompok santri tani milenial. Yang namanya KSTM itu tidak sama dengan lembaga atau pondok pesantren, kalau lembaga atau pondok pesantren memang ini ada kepeengurusan, kalau pesantren ada pengasuhnya Pak. Memang ini kalau aturan Juklak-Juknisnya itu lahan yang harus tersedia ada 800 M2, tapi kalau KSTM yang namanya Kelompok Santri Tani Milenial tidak harus berada di pondok pesantren. Mereka kalau di pondok pesantren kalau namanya kelompok itu lahannya kan milik kelompok bukan milik Lembaga, ini milik pengasuhnya juga tidak bisa karena ini kelompok santri. Statusnya sama dengan Poktan, Gapoktan, KWT. Jadi untuk KSTM ini kita merekrut juga Kelompok Santri Tani Milenial, siapapun yang muslim yang santri tani milenial di desa-desa meskipun tidak di pondok ini santri Pak. Jadi kami merekrut karang taruna-karang taruna, remaja-remaja masjid yang mempunyai ini kita bentuk KSTM-KSTM ini.

Jadi aturannya harus sama dengan Poktan, kelompok tani, KWT ini sama tapi dalam Juklak-Juknisnya ini disamakan dengan pondok pesantren dan lembaga. Ini kami keberatan sehingga mayoritas yang kami usulkan ini tidak bisa menerima program P2L karena terkendala lahan yang 800 sampai 1.000 meter persegi. Itu perlu nanti dievaluasi untuk di 2022, semoga bintangnya tadi tidak jadi berpindah. Jadi mungkin pindah Dirjen saja, kami bertahan untuk P2L tetap di pertanian di Komisi IV DPR RI. Sehingga ini sangat memang sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Yang berikutnya juga yang merasa mereka keberatan, yaitu terkait hasil panen, target hasil panen. Dalam aturan target hasil panen dihitung dari panen awal sampai bulan Desember 2021 ini. Kalau Gapoktan dan Poktan ini harus mencapai target 800 kg, kalau itu Ponpes atau KSTM 1.000 kg dan ini juga harus kita pikirkan Pak, karena P2L ini berkelanjutan. Kami berharap untuk bisa tetap di Pertanian, sehingga ini bisa berkelanjutan terkait dengan pemasarannya juga harus kita pikirkan.

Yang ketiga, dalam rangka pengembangan SDM Pertanian kami mendorong adanya bimbingan teknis atau pelatihan terhadap pemasaran produk hasil-hasil pertanian melalui pelatihan e-commerce. Pengembangan SDM Pertanian merupakan kunci menelurkan inovasi yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Ada perubahan perilaku manusia, mulai dari pola konsumsi, pola pembelajaran, pola transaksi, yang akhir-akhir ini berbasis aplikasi, maka ini adalah peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Terlebih dengan kemampuan anak muda yang menginisias, menguasai IT dapat mengelola media sosial adanya bimbingan teknis ini sangat cocok untuk dilakukan selama pandemic. Kami berharap untuk bertahan di tahun 2022 bimbingan teknis terutama kewirausahaan muda, petani, dan penyuluh bisa ditingkatkan.

Terakhir kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait *food estate* meminta Pemerintah melakukan evaluasi total atas proyek *food estate* jika tidak memberikan manfaat dan malah menimbulkan kerugian proyek ini harus dihentikan. Bagaimanapun banyak pos anggaran yang jauh lebih penting untuk dibiayai ketimbang *food estate*. Sering beberapa permasalahan *food*

*estate* yang diinventarisir, yaitu pemilihan lokasi *food estate* yang tidak memperhatikan ketentuan regulasi yang ada. Sebagai contoh ditetapkan pada kawasan yang belum dilepas sebagai kawasan budidaya, sehingga konsep pemberdayaan petani untuk melakukan kegiatan produksi pada lahan yang berskala ekonomis tidak tercapai karena lahan yang disiapkan tidak ada petaniannya atau jauh dari jangkauan petaninya. Kawasan yang ditetapkan tidak disurvei secara mendetail sehingga kawasan ditetapkan tidak memenuhi persyaratan teknis untuk dikembangkan. Misalkan berada di kawasan rawa atau lebak dengan genangan air yang dalam atau berada pada lereng yang curam sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan erosi. Pengembangan infrastruktur yang terkesan tidak dipersiapkan secara matang sehingga lahan yang ditetapkan menjadi tidak dapat diolah secara maksimum. Karena kurang persiapan infrastruktur dan lokasi yang jauh dari petani maka ongkos produksi menjadi tinggi. Biaya tanam bisa menjadi 5 kali lipat dari standar biaya yang biasanya. Mohon diperhatikan ini pertanyaan dari Fraksi PPP.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

Saya ingin bertanya kepada Eselon I yang di sini. P2L inikan dibintangin ini, kalau solusinya apa. Yang kedua, yang di Litbang kemudian penelitian, pengkajian, inovasi BRIN Rp213 miliar, apa solusinya. Saya ingin tahu kalau memang P2L ini ada di perkarangan lestari ya kita alihkan.

Jadi Bapak dan Ibu, Rapat Dengar Pendapat saya skors 5 menit untuk memberikan waktu kepada Pimpinan DPR RI mengambil alih palu sidang.

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

**KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

Baik, kita lanjutkan ya. Pasti Pak, tenang Pak.  
Pak, skorsnya cabut ya Pak ya, ya skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Kita lanjutkan ke pendalaman dan kalau. Oke, sebelum didalami oleh Pak Slamet, Bu Anggi juga punya hak untuk mendalami.  
Ya dipersilakan Bu.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):**

Baik, terima kasih.

Selamat datang Pak Rusdi dan selamat datang. Mana Eselon I belum ada, kok cuma dua, tiga.

Baik, Pak Sekjen di beberapa pertemuan kita sebelumnya dan Bapak para Eselon I kita juga kita sudah mengingatkan, bahwa Balitbang dan kemudian Badan Pangan akan ada kemungkinan, bahkan bukan kemungkinan pasti ada transformasi dan harus disiapkan. Nah, hari ini ternyata P2L masih dibintangi. Lalu kemudian ada 300 berapa tadi 213 yang masih dibintangi juga. Dan itu ternyata adalah program-program kita gitu loh. Jadi kita sudah mengingatkan teman-teman dari Komisi IV DPR RI waktu itu sudah mengingatkan, tolong ini diantisipasi supaya program-program yang sudah lama kita bahas, yang sudah kita diskusikan ini tidak kacau. Jadi saya hanya mengingatkan saja, bukan mengingatkan ya menagih saja karena kita sudah lama untuk mengingatkan. Tadi Pak Ketua juga bahkan apa ini solusinya. Jadi harusnya dari awal itu diantisipasi, ini harus ada solusi. Saya hanya untuk menekankan itu saja.

Terima kasih.

Silakan Kang Dedi.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya silakan Pak Dokter Slamet untuk didalami dan maskernya boleh dibuka Pak. Bapak kan punya daya tahan yang sangat tinggi hidupnya Pak.

#### **F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Terima kasih Pak Dedi.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih kePimpinan dan juga seluruh Anggota.

Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Rusdi Masse, selamat bergabung di tim Komisi IV DPR RI. Katanya *Insyah Allah* masih Fraksi Komisi IV DPR RI begitu, mudah-mudahan itu masih awet.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, Pak Sekjen, dan jajaran. Yang pertama, saya menguatkan yang disampaikan Bu Ketua, langsung usulan saja. Apakah tidak sebaiknya kemudian rapat ini diskorsing untuk kemudian Rapat Konsultasi dalam rangka menyelesaikan semua itu Pak. Prinsipnya nampaknya kita sepakat silakan rumahnya bawaasal isinya jangan dibawa. Inikan harus selesai hari ini menurut saya, sehingga diskorsing Pak Ketua usulannya untuk kemudian Rapat Konsultasi untuk membicarakan itu. Itu yang terkait dengan rapat hari ini.

Yang berikutnya, saya hanya ingin komentar terhadap program yang tertulis saja di PSP ini. Jadi ini berulang untuk e-RDKK terkait dengan untuk penerimaan dan pendataan sebanyak 10.000 orang itu Rp74 miliar kalau angka

saya nggak salah itu Pak. Dan itu setiap tahun berulang e-RDkk-RDkk. Kami di Panja salah satu fokusnya adalah untuk menelusuri proses pembuatan Panja. Oleh karena itu, nanti mohon dijelaskan terkait dengan e-RdKk. Jadi itu mungkin usulan konkritnya, mohon untuk dibereskan hari ini terkait dengan program dengan rapat konsultasi.

Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pimpinan, ijin.

**KETUA RAPAT:**

Siap.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya mendukung sekali apa yang dikatakan tadi oleh Dokter Hewan Pak Slamet. Perihal apa kita *break* dulu bagaimana dana ini supaya jangan lepas bintang tetapi pindah, kita pindahkan posisinya kepada Ditjen yang lain, misalnya Ditjen PSP atau Tanaman Pangan. Saya rasa usul yang bagus kita *break* 30 menit, sambil makan, Ishoma, sambil kita bahas. Jangan sampai di bintang kemudian tiba-tiba apa yang dikatakan Pak Multazam tadi hilang dibawa angin.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Yang sudah sholat dan sudah makan jadi istirahatnya dua kali, tapi nggak ada problem kita skors 30 menit. Silakan yang berbintang itu agar bintangnya tidak lepas ke pundak orang, bintangnya tetap disini dan isi bintang juga ada disini. Saya ucapkan terima kasih, rapat saya skors 30 menit.

(RAPAT DISKORS 30 MENIT)

Saya yakin tadi sudah disimpulkan dan tinggal dilaporkan langkah-langkahnya dan tidak perlu secara operasional dibahas di sini. Selanjutnya Pak Hermanto untuk mendalami, tidak ada, nggak ada, nggak ada kesimpulan. Pak Johan, Bapak masih mau mendalami juga, apalagi yang masih didalami sih Pak, yang didalami apa kan didalami tidak didalami kesimpulannya sama.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Siap Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Mau didalami?  
Silakan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mungkin bukan pendalaman, penegasan-penegasan saja Pak Ketua, karena sudah banyak disampaikan. Pertama, tren tanaman pangan inikan turun, saya catat sejak tahun 2019 sampai waktu itu masih Rp5,9 triliun sekarang Rp2,1 triliun. Nah, tentu pertanyaannya adalah apakah target produksi kita tidak terganggu dengan penurunan ini. Kita tidak mau lagi nanti saling menyalahkan, Presiden menyerahkan menterinya, menteri menyalahkan Dirjenya, dan lain sebagainya ketika ternyata produksi kedelai kita tidak terpenuhi. Ternyata kita masih impor-impor bahan-bahan pangan. Buktinya anggarannya saya hanya minta penegasan saja, apakah dengan penurunan anggaran di Dirjen Tanaman Pangan ini, itu mempengaruhi produksi atau tidak. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Wandu sebagai Dirjen bagaimana target apa namanya anggaran ini bisa menjamin keamanan stok pangan kita. Apakah bisa memenuhi target stok nasional atau tidak. Sehingga kalau misalnya ada kejadian nanti di tengah tahun itu waktu bisa kita jelas yang kita marah siapa gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu APBN ini punya fungsi otorisasi, punya fungsi distribusi, dan lain sebagainya. Saya minta jaminan lagi ke Pak Sekjen sebagai koordinator perencanaan ini. Dengan anggaran sekian triliun di Kementerian Pertanian ini apa jaminannya ketika pupuk dibutuhkan oleh rakyat itu ada, tepat, dan tidak terlambat. Apa jaminannya benih kita ketika dibutuhkan oleh petani kita itu ada. Apa jaminannya kita tidak lagi dengan target PKH tadi sekian juta saya catat 4,59 juta ton kita tidak lagi mengimpor daging kerbau dari India yang terkena penyakit kuku, tangan, dan lain sebagainya itu.

Mungkin itu saja Pak, yang perlu saya dalam. Terkait dengan P2L tadi ada pertanyaan saya itu walaupun sudah akan dikaji kemudian. Saya ingin minta jaminan bahwa walaupun terjadi apa-apa dengan Dirjen Anggaran itu P2L ini harus tetap ada di Kementan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Ketua.  
Silakan.



**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya menambahkan Pak Johan, inikan masalah pupuk ini bukan subsidi saja tapi yang nonsubsidi kan kebanyakan nggak ada. Jadi keluhan petani antara lain harga pupuk berapa pun tidak disubsidi mereka mau beli kalau ada pupuknya. Jadi kemarin saya panggil Dirjen PHJ saya minta tambahan minimal di tahun 2022 1500 agen kios se-indonesia. Nanti kita terapkan lagi 2023 tambahan sebanyak-banyak mungkin. Jadi maksudnya terjadi persaingan di pasar ini antar kios. Mungkin kalau sekarang kalau kamu mau beli sama saya beli nggak ya sudah, karena kios lain nggak ada. Tapi kalau kiosnya banyak mereka berpikir kamu beli sama saya, saya antar ke tempat kamu. Inikan terjadi persaingan yang sehat lah, tujuannya apa? supaya petani jangan kekurangan pupuk.

Juga kayak kemarin saya bilang sama dia, nanti dalam kesimpulan Panja salah satu *item*-nya adalah tidak boleh ekspor pupuk selama dalam negeri belum cukup. Nah, ini juga sebenarnya PR-nya Kementerian Pertanian ini. Harga minyak goreng sekarang tinggi sekali, harusnya kan dibuat kebijakan oleh Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian, selama konsumsi dalam negeri belum cukup dilarang ekspor CPO-nya. Inikan cuma masalah CPO, karena CPO kan saat ini harganya lagi tinggi-tinggi sekali, ternasuk juga TBS-nya sawitnya itukan lagi tinggi-tinggi sekali. Harusnya ada kebijakan yang menstop.

Itu Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pimpinan, Pak Rusdi sini dong sudah disiapin.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih para Ketuanya dari Pimpinan, Pak Rusdi lagi menikmati. Ya kalau di sini duduknya sama saya nggak nyaman Pak, kalau disanakan duduknya nyaman di sampingnya.

Terima kasih Pak Johan.

Emang ada impor daging kerbau?

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Tahun kemarin ada.

**KETUA RAPAT:**

Ada, berapa ribu ton?

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Banyak.

**KETUA RAPAT:**

Yang impor siapa?

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Sini saya jawab, ada nggak 100 ribu ton impor daging kerbau?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

80 ribu ton.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Nah, kuotanya itu 100 ribu cuma yang bisa masuk 80 ribu, dimasukin oleh BULOG. Harga di sana HPP Rp40.000 tetapi di pasar Indonesia tetap Rp80 ribu sampai Rp90 ribu. Ini ada apa? Tujuannya kan supaya harganya turun ini daging ini. Coba jangan dibikin rekomendasilah untuk impor daging kerbau. Bagaimana peternakan lokal bisa maju dan berkembang. Nanti saya kasih ini kuncinya.

**KETUA RAPAT:**

Yang impor perusahaan mana? Oh, Bulog.  
Kok Ketua tahu sih?

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Nggak, Bulog ini impor, ya sudahlah.

**KETUA RAPAT:**

Terusin dong, kok nggak transparan sih.

Baik, ya biar senyumlah ternyata Ketua kita bisa senyum. Jadi Ketua ini sekarang sudah meningkat ininya tingkat sufiannya kalau di Islam itu, makomnya sudah naik gara-gara tidak pergi keluar negeri. Jadi sudah naik dia sudah mengerti sesuatu tanpa ada muka marah tapi senyum. Kita bertanya ada apa dibalik senyum itu.

Nah, agar mengetahui senyuman Ketua itu ada apa yang paling bisa menerjemahkan senyuman Ketua itu hanya satu orang, namanya Mbak Vita. Kan satu Fraksi bajunya merah.

**F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan, dan juga Pak Sekjen, dan Eselon I.

Saya hanya sedikit saja menambahkan. Pertama, saya mau mengapresiasi beberapa kerja sama terkait dengan Bimtek yang sudah berjalan terkait dengan Eselon I. Kemudian yang kedua, saya ingin meng-*highlight* terkait dengan bantuan-bantuan ternak dan juga unggas. Terkhusus untuk bantuan unggas tadi memang saya berharap bisa ada juga untuk ayam ini disertai dengan pakannya. Memang banyak ternyata petani peternak belum siap.

Kemudian yang terkait juga dengan unggas, sapi, inikan masih banyak ketika sampai ke kandang ini untuk beradaptasi ini masih belum cukup, sehingga kadang nggak lama lagi sakit kemudian mati. Nah, saya berharap dengan bantuan-bantuan ini, itu disertai juga dengan bantuan obatnya pendamping. Jadi ada disiapkan obat untuk ternak-ternak ini yang diserahkan kepada para petani.

Kemudian yang tiga, terkait dengan hortikultura. Saya hanya ingin minta penjelasan terkait dengan dukungan *food estate* di 9 titik wilayah. Terutama kemarin saya di wilayah saya ada Temanggung, Wonosobo, itu ada *food estate* tapi saya masih belum banyak mengetahui. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan terkait dengan *food estate* di Jawa Tengah dan ada di daerah-daerah lain. Karena kalau saya lihat tadi di beberapa anggaran ini ada dukungannya untuk kampung sayuran, dan tanaman obat, kemudian juga ada kampung buah, dan florikultura, dan macam-macam di 9 tempat. Yang ingin saya tanyakan kalau di satu lokasi itu apakah memang bareng-barengan ada kampung sayuran, ada kampung buah itu jadi satu di kawasan itu. Ini yang saya masih butuh penjelasan dari Bapak Dirjen Hortikultura.

Kemudian saya juga mehg-*highlight* terkait dengan Dirjen Tanaman Pangan, mungkin saya juga menyayangkan anggaran yang turun jadi 1,4. Saya berharap ini dengan harapan tentunya ketersediaan pangan nasional kita tetap tersedia dengan baik. Namun anggarannya turun mohon benar-benar anggaran ini dimanfaatkan secara maksimal. Kita dalam rangka menjaga produksi pangan karena kemarin terkait juga soal jagung.

Kemudian saya mendukung untuk P2L yang tadi sudah disampaikan dan juga program-program dari BPTP. Sebenarnya seperti Denfarm ini ketika diaplikasikan di bawah itu di petani ini sangat petani sangat senang sekali, karena mereka benar-benar mendapat mendampingan dari hulu sampai dengan hilir. Ini yang perlu sebenarnya terus ada di pertanian sehingga menjadi satu *pilot project* di daerah-daerah, daerah pemilihan kita sehingga benar-benar ini berhasil atau tidaknya terlihat dari kegiatan yang memang pendampingannya dari hulu sampai hilir. Mungkin itu Pimpinan, sedikit dari saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Dan kita menuju ke Kalimantan Tengah ini sosok yang sangat bahagia dalam setiap waktu. Tidak ada kesedihan dalam hidupnya, dari wajahnya ada harapan, mungkin DPR RI ini bisa jadi 7 periode, Pak Bambang Purwanto.

**F-P. DEMOKRAT (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Dan Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya.

Terkait dengan pertanian, kalau saya memandang memang cukup memprihatinkan. Karena cakupan luas wilayah dan Tupoksinya ini sangat besar tetapi anggarannya sangat terbatas. Beberapa saat yang lalu saya minta supaya redesain diperbaiki sehingga diyakini oleh Menteri Keuangan, sehingga bisa dinaikkan anggarannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Undang-Undang kita sudah memberikan kebebasan produk luar untuk masuk ke Indonesia. Ini tantangan serius bagi Kementerian Pertanian, sehingga Menteri Pertanian harus bisa meningkatkan efektifitas petani kita. Dalam hal ini sudah ada juga Alsintan, ini luar biasa dan ini harapan saya Alsintan ini harus sesuai dengan kondisi lokasi jangan dipaksakan.

Kemudian juga ada Bimtek ini juga dikasih alat, dikasih ternak, kemudian dikasih ilmu. Ini cukup bagus hanya persoalannya penyuluh kita di lapangan masih sangat terbatas, baik pertanian maupun peternakan, ini menjadi persoalan juga. Kemudian biaya operasionalnya juga sangat terbatas hanya 400 ribu, kalau itu tidak di-support oleh kementerian daerah tidak akan mampu membiayai, karena daerah anggarannya juga sangat terbatas.

Kemudian jalan usaha tani juga irigasi. Terkait dengan *food estate* yang kebetulan di Kalimantan Tengah ini ada harapan Indonesia ke depan sebenarnya, karena potensi wilayahnya sangat mendukung, petaninya juga cukup bersemangat. Harapan saya ada mekanisme kerja yang menetapkan kerja terpadu. Beberapa saat yang lalu juga sudah saya sampaikan harus ada Perpres atau Keppres yang menunjuk *leading sector*-nya Kementerian Pertanian, sehingga bisa mengendalikan PUPR. Saat sekarang ini Kementerian Pertanian jadi korban karena irigasi sangat lamban. Padahal ini sangat menentukan produktifitas usaha tani tanaman pangan di *food estate* itu sendiri. Ini yang tentunya disampaikan pada saat rapat Ratas nanti, biar DPR RI lebih serius dan cepat untuk mendukung usaha di *food estate*.

Kemudian juga di Kalimantan Tengah ini di lokasi *food estate* itu ada lahan yang memang sangat potensial ini sejak saya di transmigrasi dulu, di

Terusan itu luar biasa suburnya. Dan justru kalah dengan Dadahop, sedangkan Dadahop ini sendiri kalau penanganan irigasinya tidak tepat ini tidak akan bisa mendukung hasil yang optimal. Tapi saat ini sedang dikerjakan mudah-mudahan ini kembali kepada hasil study yang dulu pernah dilakukan, sehingga bisa panen raya di sana.

Kemudian yang selama ini kami sampaikan juga beberapa saat yang lalu bahwa P2L ini adalah terobosan ekonomi baru bagi keluarga. Dan ini sangat besar manfaatnya bagi keluarga karena bisa menghemat pengeluaran keluarga dan bahkan bisa menjual sekarang. Ini harapannya luar biasa, ketika ini hilang dipending ini menurut saya jadi persoalan di Kementerian Pertanian. Kalau kita melihat Hortikultura harusnya P2L masuk di rumpun itu, tapi selama ini kita tidak pernah mencermati baru saat sekarang ketika Litbang ditarik akhirnya P2L yang di tempat Litbang ini ikut bermasalah. Saya kira tidak perlu merubah nomenklatur karena rumpunnya di Dirjen Horti itu. Memang ini diharapkan oleh masyarakat-masyarakat kecil dan ini dampaknya sudah luar biasa Pak. Jadi Pak Dirjen Horti harus menarik itu, jadi tidak usah alasan nomenklatur, karena memang nomenklaturnya sudah masuk di situ. Selama ini kami agak lengah sampai lupa saya ini.

Kemudian sebenarnya programnya ini sudah *on the track* tinggal penekanannya, kemudian keseriusan dari Kementerian Pertanian. Dan saya siap juga untuk membantu Kementerian Pertanian di lapangan dan di Dapil saya. Kemudian juga terkait dengan ekstensifikasi yang lahan punya petani itu masih banyak itu supaya ditingkatkan. Yang sawah saya nggak banjir Pak, yang gunung yang banjir itu malahan kebalik, karena hutannya gundul.

Saya kira itu nanti dari pada ditegur sama Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sudah Mas Bambang?

**F-P. DEMOKRAT (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Iya, saya tutup dulu Pak.

Tadikan dibuka belum ditutup, ditutup dulu.

Jadi kalau ada salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ini posisinya berhadapan sih jadi terganggu konsentrasinya dan Mas Bambang ini biasa nggak berhadapan. Profesor kita tadi sudah dilewat Bapak ternyata datang juga, Bapak masih mau mendalami. Usia Bapak kan sudah makin tua Pak, masa mendalami masih.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua, Pimpinan Pak Dedi, dan Pak Rusdi terima kasih sudah menampakan wajahnya, Anggota dan Pak Sekjen bersama jajaran Kementerian Pertanian.

Pertama, saya ingin memberikan pandangan bahwa anggaran tahun 2022 ini mengalami penurunan yang sebelumnya adalah Rp15,51 triliun sekarang Rp14,451 triliun, mengalami penurunan Rp1 triliun. Jadi kalau kita cermati dari tahun ke tahun anggaran Kementerian Pertanian ini mengalami penurunan. Lalu kalau kita kaitkan dengan target-target besar Kementerian Pertanian kita adalah apakah dengan anggaran sebesar ini bisa mewujudkan target-targetnya. Sementara kalau pengalaman yang lalu dengan anggaran besar saja kita kerepotan untuk mencapai targetnya. Oleh karena itu, saya menganggap perlu ada semacam optimisasi terhadap berbagai macam bentuk anggaran di semua Dirjen. Optimisasi ini saya sampaikan dalam dua hal, pertama efektivitas dan efisiensi. Efektifitas dan efisiensi ini sebagai upaya kita untuk bagaimana dengan dana yang tersedia atau dengan anggaran tersedia, kita bisa memaksimalkan usaha dan juga meningkatkan produktivitas kita, atau kita sebutlah produktivitasnya maksimum.

Tentunya ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, yaitu bagaimana membangun strategi. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Kualitas ini saya melihat dari sisi hal kualitas terkait dengan sumber daya manusia, yang tentunya ini sudah tergambar terkait dengan soal pembinaan-pembinaan SDM di Kementerian. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah kualitas apa yang kita sebut dengan barang, dalam hal ini adalah benih, bibit, dan lain sebagainya. Nah, ini saya menemukan satu hal selama ini bahwa terkait dengan soal benih atau bibit ini sering kita mengalami kerepotan karena terkait dengan kualitasnya tidak memadai, sehingga capaian atau target atau tingkat produktivitas kita itu tidak tercapai. Saya contohkan misalnya begini, tadi sudah disinggung-singgung oleh beberapa penanya. Bantuan atau alokasi anggaran untuk ternak dalam hal ini kambing, saya melihat polanya masih yang sama ini kalau kambing. Jangan sampai kita mengirimkan ini atau ternak ini setelah tiba di tempat besoknya mati gitu. Atau dua hari atau seminggu kemudian mati dan matinya nggak tanggung-tanggung, matinya itu sampai angka kita bantu 25 ekor tapi matinya 20 ekor. Jadi apakah ini kita bisa kita sebut mencapai target atau *outcome*-nya dengan maksud untuk meningkatkan eksternalitas dari pada program itu.

Nah, ini satu persoalan saya melihat ini dari segi ternak, belum dari segi yang lain misalnya kemarin ada keterlambatan dari bibit atau benih dari hortikultura. Petani itu sudah membuka lahannya, sudah membenahi lahannya, tapi benih atau bibit itu nggak kunjung datang. Sehingga ini juga berdampak kepada tingkat produktivitas kita. Saya minta ini juga hal-hal yang lain secara umum saya menemukan banyak hal terkait dengan agenda-agenda pertanian

kita secara umum itu mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, inikan kita masih di awal tahun atau di awal perencanaan. Saya pikir ini semuanya harus kita benahi, jangan sampai kita mengirimkan bantuan pertanian itu kepada kelompok-kelompok tani menimbulkan biaya yang lebih tinggi lagi. Saya harapan juga misalnya di sektor Alsintan, Alsintan ini sebenarnya sudah massif.

**KETUA RAPAT:**

Masih lama nggak Pak, kira-kira.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Dikit lagi Pak Ketua, karena namanya pendalaman tadi, kalau dalam dakik itu.

**KETUA RAPAT:**

Saya tenang Pak, yang lain yang nggak tenang.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua sekarang sudah arif dan bijaksana.

Nah, jadi menurut saya ini hal-hal seperti ini misalnya Alsintan itu harus sekarang bagaimana meningkatkan bengkelnya, tadi saya lihat ada perbengkelan. Saya lihat bagaimana bengkel ini bisa membenahi mesin-mesin Alsintan yang ada di lapangan, sebab mesin-mesin kita ini rawan rusak. Baru 2 atau 3 hari sudah alasan, komponennya pun juga sudah rusak, dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan produktifitas kalau mesinnya sendiri atau bantuan ternaknya sendiri, atau bantuan yang lain, benih dan bibit segala macam itu tidak memiliki kualitas yang memadai saya meragukan hasil dari apa yang kita rencanakan.

Demikian Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Sudah Pak? Sudah.

Selanjutnya Bu Sa'adiah Uluputty, sudah nggak jadi?

Ya sudah Mbak Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, ingin menyampaikan yang tadi sempat menurut penuturan teman-teman terkait bagaimana penguatan UPT di bawah Horti ini terjadi di lapangan, bahwa terkait permasalahan hama, gerdal gitu, gerakan pengendaliannya yang memang tidak bisa langsung diambil tindakan, karena Pak Dirjen Horti ini nggak punya kaki di bawah Pak. Jadi ini mungkin Pak

Sekjen *update* dari lapangan mungkin untuk segera dipikirkan dan ditindaklanjuti, jangan dipikirin doang gitu ya Pak Sekjen.

Kemudian terima kasih kepada PSP, kayaknya dari bahan ini cuma yang ada capaian kegiatan per *output* ini dari cuma PSP dari tadi saya bongkar-bongkar cuma PSP yang bikin. Saya harap PSP bikin ini juga paham bahwa ini untuk barometer kinerja 2022 dan seterusnya. Jangan ditempelin doang tapi kurang lebih nggak dipahami ini buat apa. Contoh ini di halaman terakhir karena kebetulan Panjanya *on going* kayaknya masalah pupuk bersubsidi itu kayaknya dari tahun ke tahun barometernya sudah jelas, angkanya nggak geser dari 9 juta. Kenapa juga diusulin mesti sampai 21 juta ton, kan begitu ya. Jadi inilah barometer kerja anda Pak depan ya, jadi jangan juga PSP sebagai Tusinya sebagai apa itu harus diperkuat dengan untuk penguatan produksi pertanian. Karena yang saya baca kan PBB-nya pertanian ini paling rendah 0,38% kalau saya nggak salah PBB dibanding dengan sektor-sektor lain.

Kemudian masalah BPSDMP coba nanti Pak Dedi, masih Pak Dedi kan ? kirain sudah jadi Irjen, habis irjennya nggak nongol-nongol yang baru. Badan BPSMP inikan terkait, pertama saya ingin memastikan lagi Pak, yang masalah 3 SPT se-indonesia inikan tinggal segitiga toh, Sumsel, NTT, satu lagi Kalsel, ini belum naik statusnya kan. Nah, itu mau sampai mana itu? paling tua kali yang paling tua yang paling ditinggalin bingung juga kita.

Terus juga *requirement* terkait penyuluh-penyuluh ini kayaknya ada hal-hal yang memang apa mungkin dengan peningkatan *requirement* penyuluh ini bisa di *cathup* nggak. Saya rasa dengan postur anggaran ini harusnya bisa ya Pak, ya kan. Karena penyuluh juga tolong Bapak ingat BOP-nya itu Pak, jadi permasalahan juga karena biaya operasional ini yang terkadang setiap permasalahan tempat beda lagi.

Nah, Kemudian tadi yang masalah bintang-bintang di langit tadi. Ada yang dibintang, ada yang nggak, mungkin Pak Sekjen, saya lihat kan di halaman 12 ini fungsi pengelolaan di halaman 12 itu pelaksanaan legislasi perundang-undangan. Nah, salah satunya cobalah Biro Hukum Bapak itu disuruh baca anggaran yang ada masa nyari peraturannya susah, terkait yang tadi temen-temen diskusikan, gitu loh. Bapak kalau mau gimana caranya itu harus diperjuangkan betul.

Nah, kemudian masalah Litbang tadi sempat diskusi sama teman-teman. Saya mohon maaf Pak Fajri, Pak Fajri itu mungkin termasuk yang dari awal sudah diingetin tapi terlambat mengambil aksi. Oke lah teman-teman mungkin konsen terhadap anggota Bapak, keluarga Bapak yang dibedol desa hari ini digeser semua, tapi Bapak pikirin nggak yang jaga kandang, kan ada yang *outsourcing* Pak, gimana itu statusnya, ya kan *outsourcing* Bapak gimana. Jadi Bapak jangan ngelihat yang berstatus jelas, saya tahu juga ada *outsourcing* di situ. Jangan dibedol desa biar nggak pusing dipilih ya kan statusnya jadi apa. Kalau kemarin KKP bilang jadi perekayasa, saya nggak tahu di Pertanian. Ya saya harus kritisi Pak Sekjen, masalah transformasi Litbang menjadi apa ini termasuk terlambat, padahal kita sudah kasih tahu dari kapan tahu kan. Jadi ini kritisi saya Pak.



Nah, kemudian terakhir mengingatkan sudah berapa abad ini Kementerian Pertanian nggak punya Itjen. Jangan menyalahi aturan kerja kita Pak ya, ya saya yakin lah masa nggak ada sumber daya manusia sama sekali untuk dijadiin ini namanya jeruk makan jeruk Pak. Sekarang siapa Irjen Pak Sekjen? Jeruk makan jeruk kan, saya bilang masa jenangan meriksa diri sendiri. Jadi saya menggarisbawahi termasuk ini Plt. Perkebunan ini Pak Ali Jamil masih Plt kan, sudah ngurus kebun ngurus PSP. Ya kalau misalkan Badan Ketahanan Pangan hilang ya kasihilah itu Pak Sarwo, misalnya kayak begitu. Maksudnya ini yang kelihatan di depan mata orang-orangnya, kan begitu.

Jadi itu saya hanya mengingatkan Pak Sekjen, bekerjalah sesuai aturan Plt jangan kelamaan karena itu ada aturannya Pak. Jadi itu saja, terus tadi ada pesan dari Pak Sunarna untuk Dirjen PSP juga, eh PKH, masalah sapi jangan dikasih sapinya doang katanya. Ada apa hal-hal yang terkait teknis supaya sapi itu bisa terus meregenerasi itu seperti apa yang harus dipikirkan itu. Pakannya kek, apanya saya nggak paham, tadi saya hanya menyampaikan mungkin nanti Bapak bisa komunikasi langsung saja kepada beliau seperti apa.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih atas waktunya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih

Saya lihat Ibu Kiki ini hebat banget, kalau di Kementerian Pertanian ngatur jabatan itu lama Pak, harus *open bidding* segala macam mungkin tinggal ngatur saja, ini kesini ini sini, gampang banget ya sudah tinggal disiapin SK-nya. Iya gampang banget perkara yang ini lama loh nggak selesai-selesai, ini harus kesini-kesini lama itu. Ibu Kiki tinggal kapan sih pindahanya, ini pindah kesini, kenapa sih dirangkap-rangkap kan banyak yang kosong, tinggal bagi saja. Kalau memang kekurangan orang kita masih punya itu Kanjeng cukup, Mas Salim Fakhry juga sudah siap kan, siap ya. Mbak Vita mau dibawa nggak kalau Bapaknya jadi Irjen, Mbak Vita.

Pak Trisno, dipersilakan.

#### **F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan, rekan-rekan Anggota, Pak Sekjen, beserta jajaran Dirjen dan Kaban.

Saya sama dengan Pak Johan ingin mendapatkan penegasan saja. Di halaman 6 bahannya Pak Sekjen, itu target produksi komoditas utama dari mulai padi 55,9 juta dan seterusnya. Pertanyaan saya tentunya rencana itu bisa dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang ada sekarang. Pertanyaan saya

adalah target itu mencukupi kebutuhan pangan 2022 atau tidak. Dan mana yang tidak mencukupi, tentunya yang tidak mencukupi pasti akan impor. Supaya kita ini bisa menjaga, sudah bisa memprediksikan, sudah bisa menyiapkan manakala kemudian itu juga terjadi impor. Kenapa? Karena kalau sudah apa namanya ada kebijakan impor pasti publik ribut. Kemarin semester pertama saja ada impor beras 14.800 ton padahal itukan keras khusus bukan untuk konsumsi, kemudian ada 182.000 ton juga untuk beras pecahan itu untuk industry. Ini seolah-olah kan kita kekurangan beras, padahal beras kita cukup. Nah, hal-hal yang demikian inikan juga bisa menimbulkan ketidakkondusifan politik manakala kita tidak siapkan dari awal.

Kemudian Pak Sekjen, Pak Dirjen Tanaman Pangan. Rencana produksi pangan memang meningkat dari 2021 ke 2022, dari 54 juta ton ke 55 juta ton. Cuma kalau kita cermati awal saya masuk saya membaca data pernah terjadi produksinya sampai 80 juta ton. Pertanyaan saya begitu kita cermati lebih dalam justru lahan apa namanya sawah bakunya itu dari waktu ke waktu menurun. Pertanyaan saya mengapa itu terjadi, kalau terjadi pergeseran itukan di kota, di daerah-daerah pedalaman pun juga terjadi penurunan. Ini juga mohon untuk juga dijelaskan, supaya program ini jelas kita bisa menjaga apa namanya produk kita ini.

Kemudian sekarang ini dengan musim hujan lebih awal petani mulai menggarap lahan, sudah mulai menyemai, ada kesulitan, kesulitan apa namanya bibit. Oleh karena itu, Pak Sekjen mohon di dalam Renja Pak Sekjen ini tidak ada jalan lain dalam rangka mewujudkan petani yang maju, petani yang mandiri, petani yang modern ya, agar penyediaan benih ini didekatkan. Artinya apa? penangkaran benih agar diperluas supaya masyarakat mudah mendapatkan benih tidak menggantungkan terus-menerus bantuan dari Pemerintah.

Kemudian di dalam rencana program utama kementerian ada perluasan lahan. Tadi saya katakan kok luas lahan bakunya apa namanya menurun, ini objeknya polanya seperti apa, supaya lahan kita bisa diperluas, karena justru yang terjadi pergeseran. Pergeseran fungsi lahan pertanian kepada fungsi yang lainnya, bahkan lahan yang ada saja lahan Perhutani sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan yang lainnya. Dan untuk perlindungan apa namanya lahan pertanian, program UPO bagus, kemudian integrasi pertanian dan peternakan pun juga sudah beberapa langkah, apa namanya petani mengembangkan pertanian, tapi juga untuk menambahkan pendapatan juga apa namanya berikan peternakan. Persoalannya adalah apakah mungkin karena anggarannya menurun sekarang cuma Rp1,6 triliun di Dirjen Peternakan. Kita program aspirasi saja informasi dari TA saya itu lebih kecil dari pada tahun 2021. Mohon kalau ini program mau direalisasikan tentunya harus seimbang dengan juga rencana program aspirasi untuk pengembangan peternakan, ini langkah yang sangat bagus untuk apa namanya petani juga dipadu serasikan dengan mengembangkan peternakan.

Kemudian Pak Sekjen terakhir ini, selama saya pernah menjabat sebagai Bupati, tidak begitu dominan peran daerah sekarang begitu luar biasa peran daerah itu dalam mengakses program-program pertanian. Hanya

persoalannya adalah peningkatan produksinya tidak seimbang. Program-program reguler yang ke daerah pun juga banyak, tapi dari waktu ke waktu orang-orang itu, kelompok-kelompok itu saja yang menerima bantuan. Oleh karena itu, saran saya Pak Sekjen agar bantuan-bantuan ke daerah itu diimbangi dengan rencana konkrit dari pada daerah itu sendiri, agar target capaiannya, sasarannya tepat waktu, tepat sasaran. Jangan itu-itu saja bagaimana bisa terbangun petani mandiri manakala dari waktu ke waktu hanya kelompok-kelompok itu saja yang mendapatkan fasilitas. Saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih.

Seluruh pendalaman sudah selesai, kita mengarah pada sama-sama dari Lampung dua-duanya sudah ada di sebelah kiri saya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ini saya barusan baca bahannya Dirjen PSP ya, mungkin saya gagal paham atau saya nggak ngerti atau saya apa. Coba dibuka halaman 6, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat 14 kelompok ini Rp200 miliar. Saya salah atau saya gagal paham coba dijawab, tolong dijawab.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, ini khusus di areal pertanian kita Pak, itu yang pertanian terpadu dataran tinggi. Ini yang dari *loan* kita Pak, ini ada 14 kabupaten, jadi 14 kelompok maksudnya tapi 14 kabupaten.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Satu kelompok Rp14 miliar, 280 juta, yang dimaksud dataran tinggi yang mana ini saya nggak paham, apa di langit atau di mana ini.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Kabupaten ini maksudnya Pak Ketua, 14 kabupaten Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Untuk apa ini?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Untuk pertanian terpadu, jadi modelnya itu *integrated farming* Pak, pertanian terpadu di 14 kabupaten.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Satu kelompok berapa hektar? Harus jelas ini kalau nanti satu kelompok Rp14 miliar tahu-tahu cuma 14 hektar, berarti 1 hektarnya Rp1 miliar.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, jadi ini kegiatan yang sebagian dari *loan* kita, *loan* jadi ini bantuan yang tentu harus nanti dari Pak Bupati atau PPD Pak. Jadi ini *integrated farming*, misalnya katakanlah sentranya kalau itu basisnya padi Pak, itu nanti ada.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Apa mungkin padi bisa didataran tinggi?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ada Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Wilayah mana contohnya, saya mau tahu.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Kemarin ada di Padang terus kemudian di Magelang. Jadi kami punya datanya di 14 kabupaten Pak, yang sudah mendaftar yang sudah ada ini direncanakan. Kemarin kami baru lihat dari misalnya Magelang Pak, itu ada, terus ada bangunan UPO-nya juga terintegrasi Pak di program ini.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Kemudian ada lagi angka Rp134.750.000.000,00 prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Siap Pak Ketua ijin, kalau ini uraiannya yang di bawah Pak Ketua yang dibawahnya, misalnya ada irigasi perpipaian, ada embung pertanian, itu totalnya saja Pak Ketua, itu uraiannya yang di bawah.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya paham, saya bukan nggak paham, saya paham. Satu lagi, prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup ada dua, ada Rp134,7 miliar, ada Rp270 miliar.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, uraiannya di bawah itu.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya tahu saya sudah lihat uraiannya, sekarang logika nggak ini. Gini loh, uang yang dikeluarkan dengan *output* yang didapatkan sesuai nggak. Kalau nggak sesuai jangan dong dirubah tempat wilayahnya. Ada lagi ini, prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kok sampai ada 3 *item* ini, 3 *item* ini kurang lebih yang pertama Rp121 miliar, yang kedua Rp270 miliar, yang ketiga Rp134,7 miliar, hampir setengah triliun.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Dibintang saja Ketua.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ini saya belum bisa menerima ini, terus terang saya nggak bisa nerima, karena ini tidak jelas progamnya apa.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, misalnya itu 270 yang 3.000 unit itu Pak, itu ada kan di situ irigasi tersier Pak, jadi jaringan irigasi tersier. Ini yang Rp270 miliar itu ada 3.000 unit Pak, 3.000 unit itulah yang kita bagi.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Jadi gini Pak Dirjen, 3.000 unit yang tahu kan *you* sama Tuhan doang yang lain belum tentu tahu. Coba tanya yang lain, Anggota lain tahu nggak, ini setengah triliun loh duit ini. Coba nanti kalau gitu kali hari ini kita nggak usah ambil kesimpulan, kita minta penjelasan dulu secara detail, setengah triliun loh.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):**

Sebentar Pak, ada lagi prasarana pengembangan kawasan 900 KM duit Rp800 miliar. Ada lagi kawasan *food estate* Rp600 miliar. Komisi IV DPR RI beberapa kali Rapat Kerja dan RDP kurang menyetujui masalah *food estate*, karena infonya sumbernya dari anggaran lain. Contoh, hortikultura yang di Humbang, berapa banyak duitnya habis. Yang di Kalteng berapa banyak habis, apa *output*-nya. Di Humbang sudah jelas kok kalau kami nggak dikasih bantuan bibit, benih, segala macam, ya kami nggak bakal tanam. betul Dirjen?

Ini ada Rp600 miliar loh untuk Saprodi Rp90 miliar, kemudian ekstensifikasi di Kalteng 190 km Rp240 miliar. Coba kita cermati satu-satu, 600 sama 804 saja sudah Rp1,4 triliun, belum yang tadi setengah lagi. Tadi halaman 6 ya judulnya ini prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup Rp134,7 miliar tambah lagi prasarana bidang pertanian, kehutanan Rp270 miliar. Ketiga, prasarana pengembangan kawasan Rp804 miliar, kemudian ada lagi kawasan *food estate* Rp600 miliar. Halaman 8 ada lagi, sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup 20.759 unit nilainya setengah triliun. Alat mesin pertanian dan pra panen sektor tanaman pangan Rp363 miliar.

Coba ini saya belum bisa nerima ini kalau begini caranya, saya minta dikaji dulu. Kalau perlu hari ini jangan ada kesimpulan rapat Ketua ya. Ini kalau nggak jelas saya nggak mau.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua, boleh kami tambahkan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT.  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Terima kasih Pak Sekjen, boleh tambahkan juga, saya kira ijin Pak.

Ini Pak, yang terkait dengan prasarana bidang pertanian yang di 134, ini tentu semua kegiatannya mendukung program strategis kita di Kementerian Pertanian. Jadi tentu ini bukan di PSP dalam artian sendiri PSP Pak, tapi adalah mendukung semua apa yang ada di kegiatan kita. Contoh misalnya Pak, ini irigasi perpipaan, embung pertanian, bangunan konservasi, terus kemudian irigasi perpompaan besar.

Terus yang berikutnya yang Rp270 miliar, itu jaringan irigasi tersier Pak. Itu cukup besar permintaan dari daerah Pak, itu yang RCT Pak Ketua, RCIT itu kita sudah masuk ada 275. Terus kemudian ada untuk yang di tugas pembantuan itu 325-an itu Pak, jadi itu semua. Terus kemudian yang di kawasan kita mendukung sebuah kegiatan-kegiatan di yang di Eselon I lainnya kita Pak. Misalnya kita ada di Tanaman Pangan, di Horti, ada yang lain-lain itu tentu dari yang ada di PSP sekarang Pak Ketua.

Mungkin ijin kalau Pak Sekjen bisa menambahkan.

Terima kasih Pak Ketua.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya masih belum bisa terima anggaran demikian besar tidak jelas, apa tujuannya, *output*-nya apa. Kalau TP kasih 1 kilo bibit jagung menghasilkan 5 kilo jagung *real*, tapi kalau inikan nggak jelas. Coba apa coba yang dibangun coba, belum yang lain nanti kita periksa teman-teman satu-satu Pak Dirjen, inikan nggak jelas ini apa. Seingat saya *food estate* itu kami sepakat Komisi IV DPR RI semua fraksi tidak menyetujui. Karena kalau dibangun okelah saya tahu ada masa konstruksi misalnya 2 tahun tidak menghasilkan, tapi tahun ketiga apa *output*-nya. Ini uang negara loh Rp3 triliun loh.

Saya kembalikan kepada Pimpinan, tolong diputuskan yang terbaik.

Terima kasih.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, sebentar dulu kan belum diputusin.

Nanti dimasukkan di kesimpulan, kita evaluasi apa pun judul uang yang itu pengelolaan keuangan negara yang harus dijelaskan secara komprehensif maksud, tujuan, manfaatnya. Dan jangan dulu Ibu Kiki, saya itu tadi sudah minta Ibu loh tapi Ibu diam, dikira nggak mau ternyata Ibu adalah yang dipikirkan yaitu nasib masyarakat di daerahnya.

Silakan Ibu.

**F-PKS (Hj. SA'ADIAH ULUPUTTY, S.T.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,  
Pak Sekjen serta Bapak-bapak Dirjen.

Ini membahas anggaran 2022 di Masa Sidang ini penghujung tahun 2022. Rasanya memang harus ada semacam persembahan untuk petani-

petani kita di saat rapat-rapat pembahasan anggaran seperti ini. Nah, melihat trend anggaran di Kementerian Pertanian memang sebagaimana disampaikan saya membuka dari materi yang disampaikan, trennya memang sering turun ya Pak Sekjen, dari Rp21 triliun kemudian Rp15 triliun, naik 16 dan turun Rp14 triliun.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan jangan sampai ada aspirasi masyarakat, aspirasi petani, dan aspirasi daerah dikurangi. Mungkin *good will* politiknya adalah harapan kita minimal Anggota Komisi IV DPR RI itu setiap tahunnya aspirasinya ditambah Pak, jangan sampai dikurangi, itu permintaan kami.

Yang kedua, soal di Dirjen Tanaman Pangan. Saya menyoroti soal bagaimana satu keluhan-keluhan yang disampaikan dari masyarakat dari waktu ke waktu itu soal adanya koordinasi Pak Sekjen. Dari hulu sampai dihilirnya petani mengeluhkan soal selalu saja tekanan yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian itu soal produktivitas, tetapi benih yang disediakan itu tidak seperti yang diharapkan. Lalu kemudian harga soal harga yang setiap kali masa panen itu harganya selalu anjlok yang mengakibatkan kesejahteraan petani kita itu kemudian nilai tukar petaninya itu turun Pak. Harapannya itu ada satu perbaikan tata kelola dari waktu ke waktu semakin baik, ada fungsi-fungsi koordinasi antara lintas Kementerian, sehingga kita bisa mengawal, kita juga bisa menjaga marwah Komisi IV DPR RI ini ke masyarakat. Ketika Kementerian Pertanian yang disoroti masalah harga kita selalu kemudian saya akan melempar tangan bahwa ini bukan persoalan di Kementerian Pertanian tetapi di Kementerian Perdagangan. Maka salah siapakah sebenarnya jika kemudian ujung dari semua itu adalah yang merasakannya itu petani-petani kita yang ada di masyarakat.

Yang kedua, di Dirjen Perkebunan. Pak Dirjen, kami ya khusus daerah-daerah yang punya komoditi perkebunan pala, cengkeh, kelapa, coklat, kami sangat ingin sekali program-program, konsep-konsep pengembangan yang maju, mandiri, modern, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri itu juga terjadi pada daerah-daerah dengan sumber daya komoditi perkebunan Pak. Terus terang kami itu cemburu jika kemudian ada irigasi yang bagus masuk di daerah-daerah sawah-sawah pematang sawah, tetapi di daerah-daerah pertanian dengan sektor perkebunannya kemudian mengeluhkan soal tidak ada jalan-jalan usaha tani yang menghubungkan pusat-pusat produksi.

Kemarin Pak, kami memang mendapatkan bantuan jalan usaha tani tetapi 100 juta. Saya menawarkan ketika melakukan Reses ke daerah-daerah yang di sana daerah-daerah perkebunan yang sangat-sangat setiap kali Reses mereka itu minta "Ibu, tolonglah jalan usaha tani", tetapi 100 juta saya tawarkan mereka tolak Pak. Tadi saya melihat ada nomenklatur di Dirjen Perkebunan soal jalan usaha tani, mungkin daerah lain tidak minta. Saya Pak, dari Maluku minta untuk jalan usaha tani kalau bisa ada 3 lah Pak, 5 bila perlu atau 10. Untuk menjawab bagaimana agar produktivitas tanaman-tanaman pala kita, tanaman cengkeh, tanaman kelapa, yang kita semua mengharapkan ini bisa menjadi salah satu komoditi andalan di Indonesia.



Saya melalui rapat ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajri, yang kemarin kami mendapatkan program hilirisasi kelapa. Pak Ketua, saya juga terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah menyambungkan suara ke Pak Fajri. Terima kasih sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ada teknologi pasca panen yang itu menjawab berbagai persoalan masyarakat di hilirisasinya Pak. Nah, kalau ke depan ada program-program seperti ini harapannya bisa dialokasikan lagi, makanya yang bintang-bintang tolong dicabut kembali Pak.

Yang terakhir, soal P2K Pak. Kami minta ada tambahannya kemarin di Maluku cuma 20 ya kalau bisa ada 50 lah ya Pak. Mungkin juga mewakili teman-teman yang dari tempat lain tadi kami Ibu-ibu, Ibu-ibu Komisi IV DPR RI berdiskusi dengan P2L kesempatan Bapak-bapak bertemu Ibu-ibu dan juga Ibu-ibu bertemu Ibu-ibu, jadi harapannya bisa ditambah. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Harapannya akan terwujud.

Pak Salim, silakan Pak Salim.

Tadi nggak cukup pertemuan tadi, belum selesai.

**F-P. GOLKAR (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pak Sekjen, saya kira gini saja apa aspirasi Pak Sudin tadi juga kita tampung, cuman kita ini orang berpolitikan mau berkomunikasi, komunikasi adalah obat yang paling ampuh Pimpinan Rapat. Mungkin belum dijelaskan dari pihak Kementerian Rp230 miliar tersebut, makanya wajar jangan. Makanya saya nggak mau baca ini Pak, berpuluh-puluh buku ini pusing kepala saya memeliharanya Pak. Cuma setelah nanti dijelaskan oleh teman-teman mitra kita mungkin kita pun bisa apa. Saya dukung Pak Ketua, tadi Rp373 miliar. Kadang-kadang kan begini apa situ kadang pun macam, ya kalau kita berkomunikasi saya kira Pimpinan ada titik temunya Pak Pimpinan. Cuma kalau tidak kita berkomunikasi maka sering kita erosi seperti Ibu Kiki.

Makanya saran saya tidak salahnya agar rapat ini jangan lagi maksudnya waktunya Bapak Ketua, supaya mana yang terbaik saya kira teman-teman Kementerian pun masih bisa terbuka Pak Ketua. Begitu saya melihat wajah Pak Sekjen sama Pak Ali Jamil ini pun rasanya iba saya melihatnya. Cuma ketika anggaran ini timbul juga apa saya Pak Ketua, ada apa ini Rp130 miliar. Ini cuma sumbang saran pikiran Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Ijin Pimpinan.

Saya ini mau mengkritisi pupuk menyambung marah-marahnya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar ya, Ketua tidak marah, Ketua menyampaikan angka-angka secara komprehensif. Wajahnya saja, nggak marah itu baiknya beliau begitu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Wajahnya lucu memang tapi intonasinya marah itu.

Nggak saya mau nanya juga masalah anggaran-anggaran yang tadi mumpung lagi tersorot. Di Hortikultura saya cuma menggarisbawahi ada pengadaan benih horti 2022 ya. Itu jumlahnya 790 ribu batang, itu paling tinggi. Di point 3-nya ada untuk 2023 oke produksi benih, saya ingatkan Pak Prihasto jangan sampai 2023 itu ada anggaran masuk lagi berarti ini sudah *probite*. Jadi saya akan garisbawahi hari ini, kalau sampai muncul lagi berarti ada yang salah. berarti di 2023 nanti kita cek muncul nggak, karena Bapak sudah menyediakan 2 juta batang hari ini, 2 juta benih.

Jadi betul yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini kalau mau kita bongkar dari jaman dulu dari jaman pertama kali saya duduk itu terlalu banyak. Kalau *food estate* dari awal saya komitmen, konsisten menolak dari awal. Jadi maksud saya besar harapan saya yang disampaikan Pak Ketua tadi kalau ada anggaran-anggaran yang tidak sesuai lebih baik ditarik. Contoh di PSP juga selain yang Pak Ketua sorotin saya juga ada sebenarnya, kok tidak sesuai dengan tugas pokoknya PSP. Muncul pula itu nomenklaturnya di Horti, saya tadi sudah mau nanya sebenarnya tapi berhubung Pak Ketua marah saya tarik. Kenapa ada roda empat itu di Horti, ada berapa jumlahnya, Pak Prihasto berapa jumlahnya. Nah, jadi pertanyaan 20 lokasinya di mana, kalau mau bicara sama rata, sama rasa, satu Indonesia ini adalah *treatment*-nya sama untuk sektor pertanian jangan pilih-pilih kasih. Dataran tinggi di mana kata Pak Ketua tadi kan begitu, semua petani toh. Itu yang tadi Ibu Sa'adiah sampaikan juga. Jadi kalau mau kita buka ini betul wajar saja Pak Ketua marah. Saya setuju nggak usah ambil kesimpulan kalau memang mau, kan begitu ya. Tapi kita harus berlaku adil semua kita bongkar ini karena banyak banget, dari tadi nggak mau ngomong karena takut waktunya habis. Tapi ternyata waktu ada perpanjangan apalagi ada Pimpinan baru yang warnanya sudah sama saya jilbabnya hari ini.

Jadi saya harap kalau memang ada hal-hal yang itu lebih baik Pak Sekjen ya saya sempat ingat nih masalah yang masalah di hortikultura ini, roda empat, ya entah apakah itu roda empat itu, 20 itu lokasinya di mana. Ya Pak Jamil tadi bicara *integrated farming system*. Saya ingat karena saya yang sering banget bunyiin *integrated farming system*. Saya yang paling cerewet cuma mungkin gambaran *integrated* itu seperti apa, elaborasi seperti apa, itu yang mesti dijelaskan, gitu ya Pak Sekjen beserta Eselon I lainnya. Jadi

mungkin kita cobalah menggambarkan sebuah program walaupun jadi lucu. Ini RDP harusnya kalau mau memang ada hal-hal yang disampaikan kemarin waktu awal dong jangan sudah di tengah jalan kan begitu.

Terima kasih Pimpinan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Begini Pimpinan, hasil Rapat Konsultasi tadi itu meminta kepada Pak Sekjen untuk koordinasi dengan Dirjen DJA. Olehnya itu hari ini tidak mungkin kita akan mengambil keputusan, karena hasil konsultasi dengan Dirjen DJA itu akan menentukan pengalokasian kembali terhadap tanda-tanda bintang-bintang itu dialokasikan ke Dirjen mana, kalau memangnya hasil konsultasinya nanti itu bisa dialihkan ke antar Eselon I. Kita kan menekankan supaya Rp14 triliun ini jangan lagi berkurang, jangan lagi ke BRIN, dan jangan lagi ke Badan Ketahanan Pangan.

Olehnya itu, saya minta Pak Pimpinan sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, tidak ada kesimpulan untuk penetapan anggaran di Eselon I. Nanti kita lanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Menteri setelah selesai hasil konsultasi dengan Dirjen DJA.

Terima kasih Pimpinan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Interupsi Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Profesor masih ada yang ingin disampaikan.  
Silakan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Ini mumpung kita sedang mencermati angka dan kegiatan-kegiatan. Saya mencermati ada judul program yang samanya itu adalah 6, ada 6 kali Pak Ketua, itu terkait dengan prasana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup itu di halaman 6 ada 2, di halaman 7 ada 1, di halaman 8 ada 1, di halaman 9 ada 2, jadi ada 6. Itu judulnya mirip-mirip dan sama-sama jadi berkaitan dengan soal prasarana atau sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Itu di halaman 6 jumlahnya Rp134 miliar, di halaman yang sama Rp270 miliar, kemudian di halaman 7 itu angkanya adalah Rp121,9

miliar, di halaman 8 itu jumlahnya Rp500,2 miliar, kemudian di halaman 9 itu ada 2 itu angkanya adalah terkait dengan judul yang sama Rp311,5 miliar, kemudian Rp165 miliar. Artinya ada 6 *item* judulnya mirip-mirip. Kita ingin mendapatkan penjelasan, itu satu.

Yang kedua, ini ada juga yang namanya judulnya sama ini yang terkait dengan di halaman 6 itu ada program yang disebut koordinasi ada 1. Kemudian di halaman 7 itu ada koordinasi juga ada 1, di halaman 6 ini jumlahnya adalah Rp18,1 miliar. Di halaman 7 Rp18,4 miliar, di halaman 8 Rp17,2 miliar, di halaman 9 itu Rp13,4 miliar. Nah, itu judulnya sama tapi jumlahnya begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya juga ingin mempertanyakan ini ada di halaman 6 ini koordinasi judulnya koordinasi program tadi ya Rp18,137 miliar. Di bawahnya ada Bimtek, monitoring, dan evaluasi lingkungan irigasi pertanian, jumlahnya sama dengan yang di atasnya, yaitu Rp18,137 miliar. Nah, kemudian ada lagi angka yang sama, yaitu kebijakan bidang pertanian dan perikanan ini rekomendasi kebijakan jumlahnya Rp6,39 miliar. Kemudian survey, investigasi, dan desain irigasi angkanya sama, nolnya sama, titik komanya sama. Pertanyaan saya ini masih banyak lagi ya, apakah ini seperti yang dulu-dulu kita sebutkan ini angkanya *copy paste* saja atau bagaimana itu. Nah, ini persoalan mendasar.

Kemudian juga saya menyaksikan di sini kenapa jaringan irigasi tersier itu seperti tersamar-samar tertulisnya tidak jelas dan tidak tegas. Nah, saya melihat angka-angka ini Pak Ketua, menurut saya ini nggak selesai sekarang ini. Saya minta memang ini harus ditunda nggak ada kesimpulan, nggak ada keputusan apa-apa. Kita perbaiki dulu angka-angka semuanya ini termasuk juga Dirjen-Dirjen yang lain. Saya juga melihat di sini ada di Dirjen Perkebunan, kenapa kok nggak masuk di dalam gerakan 3 kali ekspor, *sorry* sudah ada maaf. Nah, itu saja saya ingin kritisi supaya ini kita tunda saja Pak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Hanan silakan terakhir, sudah pukul 15.10 WIB.

#### **F-P. GOLKAR (Ir. HANAN A ROZAK, M.S.):**

Saya kalau nanti belum disimpulkan hari ini, saya titip saja pada hal-hal yang mungkin perlu diperbesar atau perlu diperluas. Contohnya saja perbengkelan Alsintan Pak, saya terima kasih saya sempat mengusulkan adanya perbengkelan Alsintan hanya jumlahnya ini ada 36 unit ya. Saya pikir ya kalau dimungkinkan di 55 unit biar masing-masing Anggota ini ya bisa membawa ini ke daerah aspirasinya. Karena seluruh Anggota sudah pernah menyalurkan aspirasi alat-alat mesin pertanian. Saya kira bagaimana kalau bisa diperbesar sampai 55 unit. Rp300 juta per unit ini mungkin sama alat-alatnya, sama pelatihannya, sama bengkelnya Pak. Terima kasih Pak.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Dirjen Horti dan BUN. Ini saya mohon perhatian terhadap bantuan-bantuan bibit. Tolong bantuan bibit ini benar-benar dicermati terkait dengan sumber bibitnya kemudian jarak antara sumber bibit dengan tempat penerima manfaat. Contohnya saja saya mendapat keluhan ada di Dapil saya di Lampung Utara itu ada bantuan benih lada. Bibitnya ini kalau nggak salah dari Jawa atau dari mana sehingga sampai di sana ya tidak bisa tumbuh lagi, dapat dikatakan 90% mati. Nah, ini jadi perhatian. Kalau pun ada program-program itu untuk bagaimana mendekatkan sumber bibit kepada penerima manfaat, sehingga tingkat keberhasilannya bisa lebih ditingkatkan ke depan.

Kemudian terkait dengan Dirjen Perkebunan Pak. Lada terima kasih mendapat perhatian di Lampung terkenal dengan lada *black paper*. Nah, tentunya ada program untuk mengembangkan lada ini plus varian lada ini saya kira perlu mendapatkan perhatian. Namun, kalau lada ini saya lebih cenderung bukan dibantu bibitnya Pak, dibantu tegakkannya Pak. Di daerah pemilihan saya tegakkan belum seperti di Bangka, di Bangka sudah pakai beton atau kayu yang mati sehingga tidak berebut makanan sama si lada, sama di tanaman lada. Kalau mungkin tegakkannya yang dibantu bukan bibitnya.

Kemudian Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya mohon perhatian baik perkebunan kemudian tanaman pangan maupun hewan ya Pak, terkait dengan perhatian terhadap ancaman-ancaman penyakit Pak. Saya belum melihat secara vulgar terkait dengan kegiatan-kegiatan program untuk pengendalian hama penyakit ini. Kemarin kita sudah mendapat laporan dari Ibu Luluk kalau tidak salah itu ada di Tuban ya, itu ada serangan hama tikus mereka mengendalikan tikus dengan setrum. Sudah berapa yang meninggal Pak, ini tolong mendapat perhatian, apakah tidak ada cara lain selain disetrum pengendalian hama tikus itu. PHT (Pengendalian Hama Terpadu) perlu mendapat perhatian di masa-masa yang akan datang. Termasuk ancaman-ancaman penyakit hewan ini Pak, kita harus berhati-hati kedepannya.

Kemudian titip juga yang sudah vulgar ini Pak, dari PSP sama Horti. Kegiatan-kegiatan aspirasi sudah ditabelkan Pak, yang lain belum ditabelkan kalau di PSP sama Horti sudah jelas. Misalnya satu Anggota kawasan cabai sekian, 55 Anggota sekian. Ini jadi pegangan bagi kami, kami secara dini sudah bisa mensosialisasikan ditingkat lapangan, sehingga walaupun dibutuhkan CPCL di bulan Desember kita sudah bisa masukkan, kemudian bisa dilaksanakan di awal tahun 2022. Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ini yang paling terakhir, silakan.

#### **F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Pak Ketua, jadi begini Pak Ketua, setelah mendengarkan masukan dari Pak Sudin, Mbak Kiki, Professor Salim, Pak Dirjen, Pak Sekjen, ada berapa hal

yang diragukan. Jadi saya kira dalam keputusan ini perlu ada penjelasan mungkin ada revisi internal Eselon I. Nah, untuk itu saya sarankan ada rapat lagi sekali lagi sehingga tidak ada keragu-raguan antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I. Tadi agak keras saya lihat dan memang ada hal-hal yang sudah dijelaskan tapi masih belum bisa diterima. Maka saya sarankan jajaran PSP, apa tadi yang dimasalahkan mungkin internal saja karena ini sudah diputuskan per Eselon I, kalau antar Eselon I susah, Pak Jamil mungkin jelaskanlah rinci kalau perlu digeser lagi untuk kegiatan yang logis dan bisa diterima. Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dari seluruh rangkaian rapat hari ini kita melihat ada beberapa hal yang mendasar, yang harus disikapi bersama sebagai sebuah kesimpulan kita yang nanti secara prinsip disimpulkan. Yang pertama adalah nomenklatur-nomenklatur anggaran yang berbintang karena dimasukkan pada sebuah lembaga yang lembaga itu hari ini sudah ada lembaga baru atau misalnya ada lembaga yang diurus oleh lembaga baru, kemudian tinggal diisi orangnya maka memiliki implikasi seluruh kegiatannya digeser. Padahal bisa jadi kegiatan-kegiatan yang ada di situ tidak ada relevansinya dengan lembaga yang ada yang akan nanti diisi jabatannya misalnya Badan Ketahanan Pangan Nasional. Nah, itu kan sangat merugikan Kementerian Pertanian. Banyak nomenklatur anggaran sebenarnya yang bersifat teknis kemudian tidak ada, kemudian disebabkan karena lembaganya lembaga baru, sehingga itu harus dicari jalan keluar komunikasikan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk tetap berada di Kementerian Pertanian. Dengan salah satu solusinya adalah nanti kita membuat Raker kemudian menggeser anggaran itu pada Direktorat-Direktorat yang lain, pada Eselon I yang lain yang memiliki fungsi layanan sesuai dengan nomenklatur yang dicatatkan. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah bahwa ada sebuah analisis, ada sebuah analisis adanya nomenklatur-nomenklatur anggaran yang belum bisa dijelaskan secara komprehensif *input*, *output*, *outcome*-nya mana. Dan kemudian kita harus menghindari suatu kegiatan di mana modal dan hasil lebih banyak modal. Atau bisa jadi menjadi seimbang saja sudah rugi, padahal yang kita inginkan dari sebuah modal itu kan ada *output* dan *outcome* dan benefit yang kuat bagi penguatan dunia pertanian kita. Dan saya memberitahukan juga pada Kementerian Pertanian kita ini orang Indonesia Pak, orang Indonesia ini berhubungan dengan para petani kita itu yang jangankan dibawa ke istilah-istilah berbahasa Inggris yang mereka sendiri tidak mengerti *integrated farming*, itu kan istilah-istilah administrasi Pemerintahan yang sekali yang pada akhirnya masyarakat tidak mengerti. Nanti masyarakat itu mau kemana? Mau nanam farming katanya, saking tidak mengertinya. Ini ada program penanaman farming di kebun saya.

Nah, segera dibuat kita ini mewakili jutaan petani yang sumber dayanya juga sumber daya rata-rata lulusan SMP, SD. Nah, kita harus memahami apa

yang terjadi pada mereka. Salah satu contoh yang dulu selalu saya kritik para kepala daerah maupun Kementerian adalah, misalnya kita selalu ngomong tentang petani milenial-milenial. Dan kemudian pada akhirnya antara posting dengan fakta petani milenial menjadi berbeda padahal yang harus kita perhatikan hari ini adalah para petani yang memberikan sumbangsih besar bagi negeri ini, yang menyelamatkan negeri ini dari covid, dari kekurangan pangan, dan sejenisnya. Mereka lah yang sebenarnya harus kita puja dalam setiap waktu. Jangan memuja istri muda melupakan istri tua, karena istri tua yang mengantarkan kita menjadi Anggota DPR RI, itu intinya.

Nah, selanjutnya *mangga* ini kesimpulannya, ya itu dua itu, kesimpulannya sudah saya sebutkan dua.

Silakan Pak.

### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pimpinan, apakah masih diperbolehkan ada beberapa respon.

### **KETUA RAPAT:**

Oh, iya boleh.  
Silakan.

### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua, Wakil Ketua, para Anggota yang kami muliakan.

Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan yang selalu diberikan oleh Komisi IV DPR RI untuk menyempurnakan program, kegiatan, serta anggaran kami. Kami ingin mempertegas kembali nomor satu yang berkait dengan anggaran yang dibintang berkaitan dengan perpindahan atau transformasi Badan Litbang Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, transformasi dari Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional.

Pertama, kami tegaskan ada dua alternative yang akan kami lakukan. Yang pertama, ijin kami melakukan koordinasi kembali dengan Dirjen Anggaran berkait dengan jumlah yang dibintang, itu satu. Seandainya itu tidak berhasil dan merupakan satu patokan bagi Dirjen Anggaran. Tentu alokasi-alokasi yang sifatnya teknis akan kami alokasikan pada alokasi anggaran yang berada di Kementerian Pertanian.

Perlu kami sampaikan transformasi Badan Litbang Pertanian ke BRIN menghasilkan usulan badan baru yang disebut dengan Badan Pengelolaan Sistem Pertanian. Itu yang nanti akan ada justru anggarannya kami laporkan Badan Litbang Pertanian ini ditransformasi kesana besarnya kira-kira kalau

kami proporsikan hanya 29%. Itu artinya kurang lebih 70% itu masih berada di Kementerian Pertanian yang nanti akan kita transformasi ke Badan Pengelolaan Sistem Pertanian kita. Jadi anggarannya masih bisa di-*ajust* di situ.

Kemudian yang kedua, memang yang berkait dengan Badan Pangan Nasional itu memang Cckal bakalnya *totally* dari Badan Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan Badan Litbang Pertanian ini kebalikan bahkan mungkin 90% akan bertransformasi ke sana. Kami sudah membahas dengan Dirjen Anggaran, perlu kami tegaskan lagi nanti pada pertemuan di hari Kamis saya sudah janji sama Dirjennya untuk meminta kembali kegiatan-kegiatan teknis di Badan Ketahanan Pangan untuk tetap berada di Kementerian Pertanian. Apa itu? di antaranya adalah pakan pekarangan, pengembangan P2L (Pekarangan Pangan Lestari), itu satu. Yang kedua yang berkait dengan toko tani, kemudian juga yang berkait dengan *family farming* atau pertanian keluarga. Itu yang kira-kira yang berkait dengan yang dibintang dan tentu kami akan mengikuti apa yang akan diputuskan oleh Komisi IV DPR RI.

Yang kedua, mungkin sedikit kami jelaskan Bapak-Ibu sekalian, yang berkait dengan tadi banyak dikritisi soal nomenklatur yang berada di tabel masing-masing Dirjen ini Bapak-Ibu sekalian. Ini misalnya di situ disebutkan ada apa namanya prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ini sebenarnya itu nggak bisa kami rubah, kami juga minta bisa nggak ini hanya pertanian saja supaya nggak membaurkan, kok ada kehutanannya kan begitu. Itu satu diantaranya itu. Ini sistem yang ada di DJA di dalam sistemnya nggak bisa kita rubah, yang penting adalah isinya yang ada di bawah.

Tadi menambahkan penjelasan dari Bapak Dirjen PSP, bahwa apa yang dialokasikan oleh Dirjen PSP ini sebagian besar adalah investasi infrastruktur yang pada saat ini kita kaitkan dengan program-program strategis kita. Ada regular yang kita ekspansi, ada juga yang super prioritas program yang akan kita lakukan.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jangan dulu interupsi dong, dengarkan dulu.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Mohon maaf ini Pak Hermanto, saya mau menjelaskan ke Bapak juga tadi. Di sini ada yang dicetak tebal, ada yang dicetak tipis, itu sebenarnya satu kluster. Jadi yang kebijakan bidang pertanian dan perikanan itu kelompok akun anggarannya. Tetapi kegiatan kita Kementerian Pertanian itu survey investigasi dan desain irigasi. Jumlahnya mesti sama Pak, karena cuma satu, jadi itu totalnya cuma satu 6,399 itu sebenarnya satu kegiatan yang ada di kita.



Mungkin mohon maaf membingungkan karena kami juga nggak bisa merubah akun yang dicetak tebal itu, karena itu system di anggaran.

Kemudian yang lain tadi banyak ditanyakan mengenai pupuk bersubsidi, karena kita sudah menurut saya pembahasan di Panja cukup komprehensif. Kita sudah memutuskan beberapa hal meskipun belum semuanya tuntas. Tadi juga ada yang mengkritisi komoditasnya dibatasi, betul sekali dari semula 70 kita hanya sekitar kurang lebih 16 komoditas yang akan di-cover, itu satu. Kemudian jenis pupuknya pun juga kita sederhanakan, itu yang kita lakukan di FGD Panja saya kira bagus sekali, bahwa kita adalah Urea dan NPK. Banyak yang bertanya organiknya bagaimana, kita sudah sepakat bahwa organik akan kita tempuh melalui program pupuk, unit pengolahan pupuk organik di situ yang nanti akan menjadi solusi, supaya apa? pembagiannya lebih banyak masyarakat yang kita bagi dengan subsidi pupuk ini. Kalau sekarang 8,9 angkanya tetap itu karena dialokasikan segitu 9 juta ton itu. Nah, dari 9 juta ton itu bagaimana kalau semula katakanlah 17 juta bisa nggak itu dijadikan 20-25 juta. Dengan tadi ada yang usul misalnya harga HPP-nya dikurangi itukan nanti subsidiya akan lebih besar sedikit sehingga kita bisa membagi anggarannya dengan jumlah *coverage* petani yang mendapatkan subsidi lebih banyak. Itu kira-kira yang kita bisa sudah diskusikan di Panja Pupuk yang menurut saya sangat komprehensif.

Memang kemarin ada catatan Panja bahwa kartu tani itu memang ada perbaikan-perbaikan. Sekarang misalnya pertanyaannya kalau sekarang terima bantuan pupuk, kemudian tahun depan kartu taninya untuk apa. Itu yang kemarin menjadi pertanyaan menurut saya sangat penting untuk disempurnakan. Dan kita sudah menyimpulkan di FGD itu luar biasa saya kira berkaitan dengan ini.

Kemudian ijin sekarang kita sudah sepakat bahwa aspirasi Bapak-Ibu sekalian, kami penuhi kita penuhi bukan kami, ini kita sama-sama. Kita penuhi dulu begitu kita mengalokasikan yang lainnya juga itu. Jadi sebenarnya yang untuk aspirasi sudah kita bahas untuk itu. Jadi sekali lagi Pak Ketua, mohon ijin jadi misalnya katakan irigasi perpipaan 150 unit itu memang di PSP itu bukan produksi, di PSP adalah unit infrastruktur yang terbangun. Itu yang menjadi *output* kegiatannya. Jadi itu yang akan menjadi indikator parameter capaian dari pada PSP.

Kemudian misalnya embung untuk apa? Ya sama itu semua adalah infrastruktur. Dan infrastruktur ini adalah investasi, artinya tidak pada kelompok yang sama tiap tahun mendapatkan itu. Ini bisa kita bagi pada program-program komoditasnya, makanya di sini ada nomenklatur yang mendukung hortikultura, ada yang mendukung tanaman pangan, ada yang mendukung perkebunan, ada yang mendukung peternakan yang pakan ternak tadi. Ini yang berkaitan dengan infrastruktur yang Pak Dirjen PSP tadi saya ingin tambahkan tentang itu. Kemudian betul Pak, *integrated farming* itu maksudnya pertanian terpadu Pak Ketua, jadi kita gunakan itu saja istilah itu. Saya kira terima kasih atas masukannya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto, masih ada Pak?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Masih Pak Ketua.

Saya begini saja, inikan nomenklatur. Saya ingin bertanya apakah nomenklatur ini nanti akan judulnya sama dengan Kementerian KLHK, karena itu adalah berkaitan dengan soal lingkungan hidup, kehutanan dan lingkungan hidup di situ. Nah, jadi ini saya ingin mendapatkan kejelasan karena nanti juga akan muncul dengan hal yang sama, judul yang sama. Nah, di Kementerian Pertanian ini juga sama termasuk perikanan ada juga di situ. Nah, ini apakah nanti terjadi *double* nomenklatur dan *double* anggaran, baik antara kementerian yang ada di Komisi IV DPR RI ini.

Demikian Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Ketua.

Pak Hermanto, itu ibarat wadah Pak. Jadi nanti di nomenklatur di sana juga begini. Cuma di sini harus diisi oleh masing-masing K/L, kita isinya ini kalau di infrastruktur ini, di perikanan saya tidak tahu. Tidak Pak, itu hanya isi Pak, akun untuk diisi oleh K/L. Makanya inikan simbolnya beda Pak, jumlah angkanya simbolnya beda. Misalnya yang cetak tebal itu berapa digit, ada 11 nanti kita lebih dari itu isinya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya ingin memastikan saja, tapi secara implementatif kegiatan itu terpisah.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Pisah Pak, terpisah itu wadahnya Dirjen Anggaran saja supaya mudah dievaluasi.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Sekjen, saya ucapkan terima kasih Pak Hermanto.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya mau tanya Sekjen, yang lalu ada nggak nomenklatur ini. Saya tanya ada nggak yang lalu, nggak pernah ada kan. Judulnya ini dengar saya ngomong ya, prasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ada nggak yang lalu nomenklaturnya seperti itu, coba saya mau tahu.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SEKALIGUS PLT. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Pak Sekjen, mungkin di program ya di program ini Pak, inikan dari DJA Pak Ketua. Jadi ini sudah kita masukkan sesuai dengan aturan DJA Pak Ketua, gitu Pak Ketua.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Yang saya tanyakan itu Pak Sekjen, tahun lalu ada nggak nomenklatur seperti ini, nggak ada kan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Tidak ada.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Nggak ada, nah kok tiba-tiba ada dengan rincian di atas bukit lah, pipanisasi lah. Tadi saya mengerti Pak Sekjen, anda menjelaskan embung itu investasi tetapi kalau embungnya itu jauh dari peladangan, dari sawah. Contoh dulu Pak Sekjen pasti tahu, sumber daya air itu adanya di Kementerian Pertanian jelas namanya Hilman nyambung. Sekarang ini contoh PUPR membangun bendungan di Pringsewu, Pringsewu itu tidak ada satu titik pun air yang ke sawah, betul Pak Hanan? Ini di Pringsewu, apalagi ini. Jangan sampai uang keluar dibangun bendungan sekian triliun nggak nyambung sama sawahnya, nggak nyambung sekunder, tersiernya. Kalau Way Jepara misalnya Bendungan Way Jepara itu nyambung, kalau yang Pringsewu kan nggak nyambung. Apa ini bisa nyambung siapa yang menjamin, hayo saya mau tahu siapa yang menjamin.

Saya mengkritisi ini karena ini kita mitra, Bapak semua sukses kami punya kebanggaan bahwa mitra kerja kami Kementerian Pertanian sukses. Tetapi kalau ini gagal kalau saya pikir ini semua coba-coba program ini, ini Rp1,5 triliun loh bukannya yang kecil. Apa bedanya Pak Sekjen jaman dulu cetak sawah, wasallam Rp3 triliun lebih. Bapak masih ingat waktu itu belum jadi Dirjen Perkebunan ada Gernas Kakao Sulawesi, apa hasilnya sekarang hampir Rp6 triliun gagal total. Coba pikirkan jangan coba-coba dong program

ini, apalagi kita lagi pandemi covid. Negara juga sedang mengurus bagaimana pandemi cepat berlalu.

Kenapa saya mengkritisi ini ya itu tadi kok tiba-tiba ada nomenklatur baru, nanti di Kehutanan juga ada. Coba dijawab dengan jujur deh saya tanya, *food estate* apa hasilnya, baik itu Kalimantan Tengah, Humbang, atau apa saya mau tahu. Ini loh maunya saya *clear and clean* masalah ini. Jangan terburu-buru kita pikirkan. Pipanisasi cocok nggak wilayah tertentu sangat cocok saya dukung, tetapi anggarannya kok besar sekali. Dan inikan coba judulnya hampir sama semua, cobalah ditengok di PSP hampir sama semua, 4 *item* ini sama semua judulnya.

Saya kembalikan kepada Pimpinan, terserah Pimpinan mau memutuskan apa silakan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Bahwa tadi saya sampaikan ya, kelemahan kita ini yang melakukan pengelolaan birokrasi cenderung membangun program-program baru dengan imajinasi baru. Dan secara umum hasilnya gagal, tetapi melupakan, mendorong, menstimulus pertanian yang ada yang masih compang-camping fasilitasnya untuk didorong semakin kuat, padahal mereka sudah jelas menjadi orang yang memproduksi. Ini yang saya maksud.

Untuk itu, saya sih menyampaikan di samping kesimpulannya bahwa secara terbuka ya lakukan perubahan terhadap apapun yang kita putuskan yang dinilai tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan daya dukung lingkungan dan usaha pertanian dan cenderung imajinatif. Nah, kita birokrasi ini berapa kali imajinatif itu dampak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pimpinan, interupsi lagi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saran saya kenapa sih yang tersier masih acak-acakan ini nggak diperbaiki dulu. Coba lihat maka Pak Dirjennya jangan ngikutin Menteri jalan-jalan terus dong. Coba turun ke Lampung, turun ke Sumsel lihat tersiernya nyambung nggak, berantakan nggak, ini dulu diperbaiki, itu loh. Anda kan punya anak buah ribuan, coba turun ke Lampung ke lapangan, mungkin ke Subang atau kemana lihat tersiernya sudah benar belum. Yang belum benar ini diperbaiki dulu jangan mimpi di awing-awang Bapak.

Silakan Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu penegasan dalam bahasanya Pak Ketua lebih kongkrit, saya masih agak halus-halus dikit. Dan yang menjadi kebutuhan petani hari ini adalah hal-hal yang secara teknis ada di lapangan, air yang tidak nyambung, pupuk yang belum memenuhi syarat, bibit yang belum terpenuhi kebutuhan semua, ini yang dibutuhkan oleh para petani. Dan anggaran-anggaran itu sangat cukup untuk mendorong dunia pertanian di Indonesia untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibanding imajinatif itu.

Kemudian yang berikutnya saran saya Pak, kita ini punya kaca mata yang lahir dan batin, jadi kan ini Bapak ini berbaris di depan. Jadi saya menyampaikan tadi jangan sampai ada sebuah kesan, ada kepercayaan yang diberikan pada orang sehingga kepada orang itu menumpuk jabatan. Dan ada ada kepercayaan tidak berikan pada orang sehingga orang itu juga jabatannya semakin bergeser. Ini di mata kita hari ini, untuk itu segera dibenahi. Karena Bapak memegang jabatan terlalu banyak, pelaksana merangkap pemeriksa bayangin saja, dunia merangkap akhirat sekaligus kan nggak mungkin. Nah, ini harus segera dijalankan, kita harus berpikir hidup ini tidak lagi menjabat. Kalau tidak lagi menjabat nanti takut ada masalah justru kita repot kalau jabatan terlalu banyak.

Dan terakhir saya simpulkan ada dua kesimpulan.

1. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dinilai tidak fokus dan tidak terukur. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun ulang program kerja dan anggaran dengan capaian target yang jelas dan akan dibahas pada Rapat Selanjutnya.

Anggota Setuju?  
Bapak setuju?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Program dan Anggaran yang dapat dialihkan dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal teknis, terutama kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan petani dan berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi, diantaranya Pekarangan Pangan Lestari, Bimtek, Demplot/Demfarm, dan diseminasi hasil inovasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian

segera mengusulkan pengalihannya kepada Kementerian Keuangan.

Setuju?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sekjen.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Terakhir, pesan saya bahwa upaya kita melakukan kritisasi terhadap seluruh nomenklatur anggaran dan pembahasan kegiatan tidak kurang dan tidak lebih, kecuali semangat kita membangun kebersamaan. Kemudian adapun aspek-aspek yang bersifat usulan publik yang disebut dengan aspirasi tidak ada kaitannya dengan aspek-aspek daya kritis yang kita lakukan, karena pada akhirnya aspirasi yang kita usulkan merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan publik. Ini barangkali bukan persoalan tukar menukar tetapi ini adalah bagian dari membangun sinergitas kepemimpinan yang kolektif antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Keberhasilan Bapak adalah kebahagiaan kami, jabatan Bapak adalah kebahagiaan bagi kami.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Ketua.

Tadi Pak Sekjen, menjelaskan mau membentuk lembaga baru badan. Ini menurut saya ini akal-akalan ya, sedangkan satu sisi Dirjen Horti itu tidak punya tangan di lapangan. Kenapa tidak UPT-UPT yang ada itu dialihkan saja itu lebih cepat dan sudah banyak terjadi di Kehutanan juga. Kalau badan baru bisa-bisa ditolak akhirnya jadi masalah.

Ini saran saya sebaiknya yang sudah ada konkritnya Hortikultura sudah ada di lapangan. Dan dinas sama Horti ini hubungannya tidak nyambung terlalu jauh rentang kendalinya, saya kira UPT itu sebagian dialihkan kesitu. Jangan sampai membentuk badan baru Pak Sekjen, ini akal-akalan itu namanya hanya dirubah nama, orangnya tetap, kantornya tetap, itu bisa jadi masalah nanti. Itu saja masukan saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Sekjen mau dikomentari *closing statement*-nya silakan sekaligus apa yang disampaikan oleh Kanjeng Tumenggung Darori.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Baik, terima kasih Pak Darori.

Sebelum *closing*, itu sudah *setting* Pak, untuk sebenarnya juga tidak hanya Dirjen Hortikultura, ada yang masih Dirjen lain masih terbatas UPT-nya, UPT vertikal yang ada di daerah. Oleh karena itu, itu kami pertimbangkan karena kita masih punya instrumen UPT mulai dari BPTP sampai Balai yang dulunya Balai itu bisa juga kita transformasi kesana.

Baik, saya kira terima kasih. Dan tapi Pak Darori, ijin kenapa itu? karena di atas UPT masih ada beberapa pusat dan Balai Besar. Nah, masih ada tugas-tugas Kementan untuk mendukung Dirjen teknis yang harus difasilitasi dan itu tidak masuk ke BRIN Pak. Itulah maka badan itu kita bentuk, seperti misalnya tugas-tugas perbenihan itu nanti kami fasilitasi dari badan itu di bawahnya ada Balai Perbenihan. Iya, Komisi IV DPR RI.

Baik, terima kasih para Pimpinan, Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi 4 DPR RI yang kami muliakan. Pertama, atas nama Kementerian Pertanian kami di jajaran Eselon I terima kasih atas segala arahannya. Dan mohon maaf apabila belum memenuhi harapan Komisi IV DPR RI untuk menyusun program kegiatan dan anggaran yang lebih fokus. Kami akan segera perbaiki itu sesuai dengan kesimpulan rapat.

Terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, dan Bapak-Ibu yang saya hormati. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'amin* rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Sampurasun,  
Om swasti astu.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

Jakarta, 9 November 2021

a.n. KETUA RAPAT

Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy  
NIP. 196508171988031002